



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria, perlu adanya sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sistem klasifikasi Keamanan dan akses arsip dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip dinamis;
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien maka perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan, dan akses arsip dinamis dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

- Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
8. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
9. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
11. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, Publik dan perorangan.
12. Kategori Pembatasan Akses Terhadap Arsip adalah kewenangan pengguna Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
13. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
14. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
15. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
16. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ atau ketertiban umum.
17. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
18. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.
19. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
20. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
21. Penentu Kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab dan kewenangan kedinasan ke luar dan ke dalam instansi.
22. Pelaksana Kebijakan adalah Pejabat pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas organisasi.
23. Pengawas adalah Pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan.
24. Aparat Penegak Hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan darr/ atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

25. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
26. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
27. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini:

- a. memotivasi Perangkat Daerah agar memberkaskan Arsip Dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsipnya;
- b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini:

- a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsrp dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada Publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman.
- c. tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi Publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis.
- d. terjaminnya keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan.

BAB II ASAS DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu asas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan standar operasional prosedur, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 5

Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai berikut:

- a. Arsip yang tercipta diklasifikasikan menjadi informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia;
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. Pengguna Internal hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. Pengguna Eksternal hanya dapat mengakses informasi Daerah yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB III PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Sarana

Pasal 6

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan Arsip.
- (3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis menggunakan sarana a perangkat lunak (*software*) sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.
- (4) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas yakni:
 - a. 000 Umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan;
 - f. 500 Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian; dan
 - j. 900 Keuangan;

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses

Pasal 8

Arsip Dinamis yang tercipta dan termasuk dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Daerah, antara lain:

- a. Arsip Dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Arsip Dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- c. Arsip Dinamis pada lingkungan Badan dan Dinas;
- d. Arsip Dinamis pada lingkungan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- e. Arsip Dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Arsip Dinamis yang tercipta dan termasuk dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan Arsip seperti daftar Arsip vital dan daftar Arsip terjaga.

Pasal 10

Arsip Dinamis yang tercipta dan termasuk dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Daerah meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum,
 - a. Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan *personal file*;
 - b. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon;
 - c. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;

- e. Arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. Arsip yang dengan isi akta autentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- g. Arsip yang terkait dengan Rahasia atau data pribadi;
- h. Arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*; dan
- i. daftar Arsip Rahasia.

BAB IV PENGKATEGORIAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 11

- (1) Pengkategorian hak akses Arsip Dinamis terdiri atas:
 - a. Pengguna Internal yang ada di instansi; dan
 - b. Pengguna Eksternal di luar instansi.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penentu Kebijakan yang berwenang untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - 2. pimpinan tingkat tinggi/satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.; dan
 - 3. pimpinan tingkat menengah/satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - b. Pelaksana Kebijakan yaitu staf, petugas Arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan sangat Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka;
 - b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang

sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

BAB V
PENYUSUNAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 12

- (1) Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif disusun dalam bentuk sistem klasifikasi
- (2) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Mei 2022

Pj. BUPATI BATANG,

TTD

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

TTD

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

A. SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
1	001	Lambang, meliputi : 1. Garuda 2. Bendera kebangsaan 3. Daerah (Kabupaten/Kota)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	002	Tanda kehormatan/ penghargaan diberikan kepada non pns : 1. Bintang 2. Satyalencana 3. Satyakarya Nugraha 4. Penghargaan secara adat 5. Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb) 6. Monumen	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	003	Hari Raya/besar, meliputi : 1. Nasional (17 Agustus, hari pahlawan, dsb) 2. Keagamaan 3. Hari ulang tahun	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	004	Ucapan, meliputi: 1. Terima kasih 2. Selamat 3. Mohon diri 4. Bela sungkawa 5. Ucapan lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	005	Undangan (laporan kegiatan pembuatan undangan beserta distribusinya)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	006	Tanda jabatan (Pamong praja dan pejabat lainnya) 1. Pamong Praja 2. Pejabat lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	007	Tanda Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
2	010	URUSAN DALAM	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	011	Gedung kantor 1. Listrik 2. Telepon 3. Otomasi 4. Internet 5. Air minum 6. Hidrant	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	012	Rumah dinas 1. Tanah 2. Perabotan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	013	Akomodasi/ persinggahan (Mess/ Wisma/ Hotel)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	014	Rumah susun	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	015	Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, lcd, laptop dll)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	016	Telepon / Fax	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	017	Keamanan/ ketertiban kantor	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	018	Kebersihan Kantor	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	019	Protokol 1. Tata tempat (pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		2. Audiensi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		3. Penerima Tamu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
3	020	PERALATAN / BARANG JASA	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	021	Alat Tulis Kantor	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	022	Mesin Kantor 1. Manual 2. Elektronik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	023	Perabot Kantor	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	024	Alat Angkutan 1. Orang 2. Barang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	025	Pakaian Dinas 1. Distribusi pakaian dinas 2. Jadwal pakaian dinas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
					kinerja Perangkat Daerah.	
	027	Pengadaan Barang/Jasa (termasuk pengumuman Pengadaan, penawaran, penunjukan, pelelangan) 1. Pra Kualifikasi : Rapat Persiapan, HPS, Penjelasan Pekerjaan/ Aanwijzing, Negosiasi, Evaluasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. SPK, Kontrak/ amandemen/ addendum, teguran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Surat Perintah Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		4. Serah terima pekerjaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		5. Pemeriksaan Pekerjaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		6. Perpanjangan Waktu/force majeure	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		7. Denda	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		8. Sanggahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		9. Pemeliharaan barang/jasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		10. Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa a. Riset dan analisa pasar barang/jasa b. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa c. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral d. Evaluasi pengadaan barang/jasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		11. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
		a. Pengelolaan informasi seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		b. Pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		d. Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		e. Pengembangan system informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa (UKPBJ)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		f. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		g. Pengelolaan informasi kontrak	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		h. Pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		12. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa a. Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang /jasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		b. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		c. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		d. Pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		e. Analisis beban kerja UKPBJ	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		f. Pengelolaan personil UKPBJ	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		g. Pengembangan sistem insentif personil UKPBJ	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		h. Memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		i. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		j. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten dan Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		k. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		1. Layanan Penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
	028	Inventaris 1. Pendataan barang milik negara 2. Pemeliharaan barang milik negara 3. Penghapusan barang milik negara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
4	030	KEKAYAAN DAERAH	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	031	Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	032	Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dll)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	033	Kendaraan dinas (pengurusan dan perawatan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	034	Alat – alat berat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	035	Hewan dan tanaman	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	036	Barang persediaan dalam gudang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	037	Alat pengangkut (laut, darat, udara)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	038	Peralatan kantor/pabrik/ Laboratorium	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	039	Peralatan kesehatan/medis (rumah sakit, balai pengobatan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	040	PERPUSTAKAAN /DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI Kebijakan pemerintah pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	041	Perpustakaan 1. Pameran bahan perpustakaan 2. Pengolahan dan penyiangan (Katalog, bibliografi) 3. Sirkulasi/ layanan : a. Keanggotaan b. Peminjaman dan pengembalian 1. Penghargaan 2. Sanksi c. Bimbingan pemustaka d. Perpustakaan keliling	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> e. Warung baca, rumah belajar f. Multimedia g. Audio visual h. Komputer dan internet i. Khusus bagi pemustaka berkebutuhan khusus j. Fasilitasi pelatihan dan pembelajaran gratis bagi masyarakat k. Layanan lain yang diberikan perpustakaan bagi masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 4. Deposit 5. Data stok opname bahan pustaka secara berkala 6. Pemeliharaan, Pelestarian/ alih media 7. Pendampingan dan Pengembangan Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> a. Bintek / pelatihan b. Bantuan (bahan pustaka, rak, komputer, dll) c. Pemasarakatan budaya baca 8. Penghapusan/ penyusutan bahan perpustakaan 9. Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, Perguruan Tinggi, Sekolah, Keliling) 10. Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan. 11. Akuisisi / pengadaan bahan pustaka 12. Lomba Perpustakaan dan Gerakan Gemar Membaca 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	042	Dokumentasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	043	Sistem otomasi perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	045	<p>Kearsipan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja di bidang kearsipan 2. Penyusunan peraturan / pedoman kearsipan 3. Penelusuran arsip 4. Kerjasama di bidang kearsipan 5. Pengelolaan arsip 6. Penghargaan di bidang kearsipan 7. Pola Klasifikasi Kearsipan 8. Jadwal Retensi Arsip 9. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 10. Sarana dan prasarana kearsipan 11. Akuisisi Arsip 12. Penyusutan Arsip <ol style="list-style-type: none"> a. Pemindahan Arsip b. Penyerahan Arsip c. Pemusnahan Arsip 13. Pembinaan Kearsipan <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Kearsipan b. Bimbingan Teknis Kearsipan c. Lomba Kearsipan d. Pengkajian Kearsipan 14. Perawatan, Pengamanan, Penyelamatan, Konservasi dan Pelestarian Arsip 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		a. Fumigasi b. Termite Control c. Kamperisasi d. Depo Arsip e. Restorasi f. Alih media g. Autentikasi 15. Layanan kearsipan 16. Publikasi / Pemasarakatan Arsip a. Pameran b. Wisata arsip c. Penerbitan naskah sumber arsip d. Sosialisasi Kearsipan				
	046	Pengembangan Sistem a. Sistem kearsipan b. Sistem Jaringan Informasi Kearsipan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	047	SANDI dan Telekomunikasi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	048	Data elektronik 1. Jaringan LAN 2. Internet, Intranet 3. Email 4. Hardware (Komputer,CPU,Monitor dll) 5. Software (Perangkat Lunak) 6. Website	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	049	Jaringan 1. Jaringan Intranet Antar OPD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
5	050	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. Perencanaan Pembangunan a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) d. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah e. Musrenbangdes, Musrenbangcam, Musrenbangkab 2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 3. Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 4. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 6. Laporan a. Laporan Berkala b. LKJIP (laporan Kinerja Instansi Pemerintah) c. Laporan Hasil Kajian / Studi / Survei dalam Rangka Pembangunan Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	051	Bidang Pemerintahan , Politik, Sosial dan Budaya 1. Bidang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan di bidang : Hukum, Pemerintahan, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat, Ideologi, Kesbangpol, Aparatur, Informasi dan Komunikasi dan Pertanahan 2. Bidang Politik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	052	Bidang Penelitian dan Pengembangan 1. Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Data di bidang Pelayanan Umum, Penelitian Pembangunan Daerah, Pengkajian dan Pengembangan Pembangunan 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan 2. Penguatan sistem inovasi daerah 3. Optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya 4. Diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi di daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Pengumpulan, Penyajian dan Pengolahan Data Pembangunan Daerah dan Penyusunan Statistik Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Hasil kajian, studi / survei dalam rangka pembangunan daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Inventarisasi dan perencanaan kebutuhan IPTEK untuk menunjang pembangunan daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	053	Bidang Perencanaan data, pengendalian dan evaluasi : Perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan kebijakan anggaran, Pengumpulan data, pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi , verifikasi, analisa dan pengkajian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	053	Bidang Kesejahteraan Rakyat Perencanaan Program Pembangunan di Bidang: Pendidikan, Sosial Budaya, Perumahan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Catatan Sipil dan Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan olahraga, Kesenian dan Kebudayaan serta Keagamaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	054	Bidang Perekonomian Perencanaan Program Pembangunan di Bidang: Pertanian, Industri, Perdagangan, UMKM dan Koperasi serta Pengembangan Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	055	Pengembangan Wilayah : Perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, Perencanaan bidang pengembangan wilayah, sumber daya alam, penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan pemukiman	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	055	Bidang Pekerjaan Umum Perencanaan Program Pembangunan di Bidang : Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang Wilayah, Tata Guna Tanah, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan serta Pertambangan dan Energi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	056	Bidang Pengawasan Perencanaan Program Pembangunan di Bidang: Pengawasan Pemerintah dan Aparatur, Pembangunan dan Perekonomian, Keuangan dan Kekayaan Dearah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	057	Bidang Kepegawaian Perencanaan Program Pembangunan di Bidang: Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Perencanaan Formasi, Perencanaan Jabatan, Penghargaan dan Tanda Jasa, Pengangkatan dan Kepangkatan, Pemindahan dan Peberhentian, Pensiun, Pembinaan dan Kesejahteraan, Pengolahan dan Pengujian Data	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	058	Bidang Keuangan Perencanaan Program Pembangunan di Bidang: Keuangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	059	Pengendalian Pembangunan 1. Pengendalian Pembangunan Fisik 2. Pengendalian Pembangunan Non Fisik 3. Laporan Evaluasi/ Monitoring Pelaksanaan Pembangunan 4. Kebijakan dan program pembangunan daerah 5. Pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah 6. Sosialisasi program pembangunan daerah 7. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian program pembangunan 8. Rencana kegiatan pengendalian program pembangunan 9. Fasilitasi penyusunan program pembangunan 10. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
6	060	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Peran Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	061	Organisasi 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja) 2. Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai 3. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) 4. Kinerja Aparatur Daerah a. Perjanjian Kinerja (PK) b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) c. LKJIP d. SPIP 5. Reformasi Birokrasi 6. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 7. Pelayanan Publik a. Bimbingan b. Evaluasi/ Lomba c. Inovasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	064	Organisasi semi pemerintah BKS – AKSI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	065	Ketatalaksanaan 1. Tata Naskah Dinas 2. Tata Naskah Dinas Elektronik 3. Stempel a. Stempel jabatan b. Stempel dinas 4. Papan Nama instansi pemerintah/non pemerintah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
		5. Standar Pelayanan 6. Standar Operasional Prosedur	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	066	Tata Hubungan Kerja 1. Telaah Tata Hubungan 2. Penyusunan 3. Bimbingan 4. Peta Proses Bisnis	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	067	Sistem dan Prosedur 1. Telaah 2. Penyusunan 3. Bimbingan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	068	Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan 1. Pemantauan Pelaksanaan 2. Sistem Prosedur kerja 3. Evaluasi Pelaksana sistem 4. Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				
	069	Analisis Jabatan 1. Analisis Beban Kerja 2. Evaluasi Jabatan/ Lembaga 3. Uraian Jabatan 4. Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
7	070	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	071	Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai laporan riset	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	072	Survey	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	073	Kajian 1. Kajian strategis/ diskusi/ Forum Group Discussion (FGD) 2. Seminar 3. Workshop 4. Rapat koordinasi/ rapat teknis 5. Lokakarya 6. Diseminasi/ sosialisasi hasil penelitian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	074	Kerjasama Penelitian 1. Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah 2. Perguruan Tinggi Negeri/ swasta 3. Lembaga Swadaya Nasional, lembaga Swadaya Masyarakat 4. Lembaga Internasional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	075	Studi Kelayakan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	076	Studi Kasus	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
8	080	KONFERENSI /RAPAT KOORDINASI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	082	Bupati	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	083	Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan OPD)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	084	Instansi lainnya (diluar Kemendagri)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	085	International di dalam negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	086	International di luar negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
9	090	PERJALANAN DINAS (SURAT TUGAS / PERINTAH)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon II,III dan IV)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	094	Perjalanan Pegawai termasuk pemanggilan pegawai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	099	Perjalanan Pegawai Ke Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
10	800	KEPEGAWAIAN (KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN)				
		1. Perencanaan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		2. Penelitian a. Pengaduan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
		b. Tim c. Statistik d. Peraturan Perundang- undangan e. Pengadaan f. Formasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
11	810	PENGADAAN PEGAWAI (Lamaran, penguji kesehatan dan pengangkatan calon pegawai)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	811	Pendaftaran CPNS 1. Pembukaan pendaftaran 2. Verifikasi berkas 3. Penutupan pendaftaran 4. Test 5. Pengumuman hasil seleksi administrasi 6. Masa sanggah 7. Pelaksanaan SKD 8. pengumuman hasil SKD 9. Pelaksanaan SKB 10. penyampaian hasil seleksi 11. Pengumuman hasil seleksi 12. 10. Pemanggilan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	812	Pengujian Kesehatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	813	Pengangkatan CPNS golongan I-IV 1. Pengangkatan CPNS golongan I 2. Pengangkatan CPNS golongan II 3. Pengangkatan CPNS golongan III	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	814	Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	814	Pengangkatan Tenaga Asing	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	816	Pengangkatan tenaga kontrak (surat perjanjian)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	817	Pengangkatan Jabatan fungsional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
12	820	MUTASI 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV 5. Fungsional	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	821	Pengangkatan 1. Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) a. Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I b. Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		c. Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III				
		2. Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji a. Bupati / Wakil Bupati b. Sekda c. Asisten Sekda d. Inspektur/Kepala Dinas / Kepala Badan/Direktur e. Kepala Bagian/Sekretaris/ Inspektur Pembantu/Camat f. Kepala Bidang / Sekretaris Camat g. Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang / Lurah h. Kepala UPTD i. Jabatan Lainnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
		3. Pengukuhan dalam jabatan a. Kepala Puskesmas b. Kepala Sekolah c. Jabatan Lainnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	822	Kenaikan Gaji Berkala 1. PNS Golongan I 2. PNS Golongan II 3. PNS Golongan III 4. PNS Golongan IV	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	823	Kenaikan Pangkat / Pengangkatan / Jenjang 1. Kenaikan Pangkat / Pengangkatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> a. PNS Golongan I b. PNS Golongan II c. PNS Golongan III d. PNS Golongan IV 			kinerja Perangkat Daerah	
		2. Kenaikan Jenjang / Penetapan Angka Kredit <ul style="list-style-type: none"> a. Terampil b. Ahli 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
		3. Alih Fungsi Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Tertentu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	824	Pemindahan / Pelimpahan / Pembantuan <ul style="list-style-type: none"> 1. PNS Golongan I 2. PNS Golongan II 3. PNS Golongan III 4. PNS Golongan IV 5. Lolos Butuh 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	825	Datasering dan penempatan kembali	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	826	Penunjukan Tugas Belajar <ul style="list-style-type: none"> 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri 3. Tunjangan Belajar 4. Penempatan Kembali 5. Ijin Belajar 6. Pemakaian Gelar 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	827	Penyesuaian Ijazah (PI)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	828	Wajib militer (Bela negara)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	829	Mutasi Pegawai Instansi Lain	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
13	830	KEDUDUKAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	831	Perhitungan masa kerja	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	832	Penyesuaian pangkat/gaji 1. PNS Golongan I 2. PNS Golongan II 3. PNS Golongan III 4. PNS Golongan IV 5. Fungsional	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	833	Penghargaan ijasah (pencantuman gelar)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	834	Penghargaan teknologi tepat guna, kesenian, Penghargaan Lainnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
14	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI,	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	841	Tunjangan 1. Jabatan 2. Kehormatan 3. Dana kematian (uang duka) 4. Tunjangan hari raya 5. Perjalanan dinas tetap/ cuti /pindah 6. Keluarga 7. Pangan dan uang makan 8. Tambahan penghasilan 9. Tunjangan cacat	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	842	Dana 1. Taspen 2. Askes/BPJS, bantuan kesehatan 3. Bantuan pendidikan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	843	Perawatan kesehatan 1. Poliklinik, klinik konsultasi 2. Perawatan dokter 3. Obat – obatan 4. Keluarga berencana	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	844	Koperasi/ distribusi 1. Distribusi sandang 2. Distribusi pangan 3. Distribusi lainnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	845	Perumahan / tanah 1. Perumahan pegawai 2. Tanah kapling 3. Losmen/hotel	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	846	Bantuan sosial 1. Bantuan kebakaran 2. Bantuan kebanjiran	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	847	Rekreasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	848	Dispensasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
15	850	CUTI	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	851	Cuti tahunan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	852	Cuti besar	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	853	Cuti sakit	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	854	Cuti Melahirkan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	855	Cuti Karena Alasan Penting	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	856	Cuti Bersama	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	857	Cuti Diluar Tanggungan Negara	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	858	Cuti Alasan Lainnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
16	860	PENILAIAN	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	861	Penghargaan 1. Bintang/Satyalencana 2. Kenaikan pangkat anumerta 3. Kenaikan gaji istimewa 4. Hadiah berupa kenaikan pangkat 5. Pegawai teladan 6. Penghargaan lainnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	862	Hukuman 1. Teguran/ peringatan 2. Penundaan kenaikan gaji 3. Penurunan pangkat 4. Pemindahan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	863	Konduite/SKP	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	864	Ujian Pegawai 1. Ujian Dinas a. Tingkat I b. Tingkat II c. Tingkat III 2. Uji Kompetensi a. Terampil b. Ahli	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	865	Penilaian kehidupan pegawai negeri (kasus – kasus pelanggaran disiplin/ ijin cerai/ menikah lagi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	866	Penilaian kinerja 1. Struktural 2. Fungsional	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	867	Rehabilitasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	868	Pembinaan disiplin pegawai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	869	Presensi/Kehadiran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
17	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	871	Formasi pegawai 1. Peta Jabatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	872	Bezetting/ Daftar Urut Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	873	Registrasi, Sistem informasi kepegawaian, dan data kepegawaian 1. NIP 2. KARPEG 3. Legitimasi/ tanda pengenal 4. Daftar keluarga 5. KARSU/KARIS 6. Buku Penjagaan Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	874	Daftar riwayat pekerjaan 1. Tanggal lahir 2. Penggantian nama 3. Kepartaian / organisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	875	Kewenangan kepegawaian 1. Pelimpahan wewenang 2. Spesimen tanda tangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	876	Penggajian (SKPP)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	877	Sumpah / janji	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	878	Korps Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	879	Sosialisasi peraturan – peraturan kepegawaian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
18	880	PEMBERHENTIAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	881	Atas permintaan sendiri termasuk pengunduran diri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	882	Dengan hak pensiun 1. Dengan hak pensiun golongan I 2. Dengan hak pensiun golongan II 3. Dengan hak pensiun golongan III 4. Dengan hak pensiun golongan IV 5. Pensiun janda/duda 6. Pensiun yatim piatu Uang muka pensiun	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	883	Karena meninggal (karena meninggal dalam tugas)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	884	Alasan lain	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	885	Uang pesangon	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	886	Uang tunggu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	887	Sementara waktu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	888	Tidak dengan hormat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	889	Per pemberhentian tenaga kontrak daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
19	890	PENDIDIKAN PEGAWAI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	891	Perencanaan program dan pelaporan diklat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	892	Pendidikan reguler 1. IIP 2. Akademi, a. Agraria b. Pemerintahan dalam negeri Kursus - kursus reguler	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	893	Pendidikan non reguler 1. Diklat a. Kepemimpinan dan kader (pra jabatan, kepemimpinan) b. Teknis c. Fungsional 2. Kursus – kursus, penataran, bimbingan teknis.	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	894	Pendidikan ke luar negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	895	Metode 1. Kuliah 2. Ceramah, symposium 3. Diskusi 4. Kuliah lapangan/ widyawisata/ KKN 5. Kurikulum 6. Karya tulis	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal, penentu kebijakan, pengawas kebijakan serta penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	896	Tenaga pengajar (widyaiswara)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	897	Akademi pendidikan 1. Tahun pelajaran Persyaratan, meliputi pendaftaran, testing	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	898	Fasilitas 1. Tunjangan belajar/ bea siswa 2. Asrama 3. Uang makan 4. Uang transport 5. Uang buku	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	899	Sarana 1. Buku 2. Gedung	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
20	900	KEUANGAN				
	901	Nota Keuangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	902	APBN 1. DAU 2. AAK	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	903	APBD (Perubahan anggaran)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	904	RKA	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
21	910	ANGGARAN				
	911	Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan OPD/PPKD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	912	Keputusan Bupati tentang penunjukan pemimpin,pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	913	DPA/DPPA/DPAL-OPD/PPKD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	914	Anggaran kas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	915	Surat Penyediaan dana (SPD)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	916	Gaji 1. Perubahan Gaji 2. Mutasi Gaji	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
22	920	AKUNTANSI				
	921	Laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
23	930	PERBENDAHARAAN				
	931	Surat perintah pencairan dana (SP2D)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	932	Surat penolakan penerbitan SP2D	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	933	Daftar penguji SP2D	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	934	SPJ	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
24	940	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				
	941	Bintek-bintek / kursus yang berkaitan dengan keuangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	942	Teguran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
25	950	PENGELOLAAN KAS DAERAH				
	951	Laporan pemotongan IWP, taperum, pph 21 dari gaji	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	952	Laporan rekapitulasi penerimaan daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	953	Daftar pemotongan dan penyetoran pajak (PPN/PPH) dari CV/PT/instansi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	954	Surat tanda setoran (STS)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	955	Laporan realisasi daerah 1. Laporan realisasi penerimaan daerah 2. Laporan realisasi pengeluaran daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	956	Rekonsiliasi 1. Surat rekonsiliasi penerimaan 2. Laporan rekonsiliasi bank	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	957	Laporan mutasi penempatan deposito	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	958	Surat perintah membayar (SPM) 1. Bukti Transfer	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	959	Laporan Keuangan Pemegang Kas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
26	960	EVALUASI DAN PENGENDALIAN				
	961	Tuntutan ganti rugi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	962	Tuntutan perbendaharaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	963	Evaluasi dan perubahan APBD Kab/Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	964	Evaluasi dan pertanggung jawaban APBD Kab/Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	965	Edaran-edaran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
27	970	PENDAPATAN				
	971	Perimbangan Keuangan 1. Bagi Hasil Pajak a. Pajak Bumi Bangunan (PBB) b. Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB) c. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21) 2. Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam/Migas)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	972	Subsidi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	973	Pajak 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Kendaraan Diatas Air 3. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor 4. Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan 5. Pajak Reklame	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	974	Retribusi 1. Retribusi bidang kesehatan 2. Retribusi bidang seni budaya dan pariwisata 3. Retribusi bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		<p>4. Retribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan)</p> <p>5. Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll)</p> <p>6. Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		<p>7. Retribusi bidang perikanan dan kelautan</p> <p>8. Retribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi</p> <p>9. Retribusi bidang lainnya (termasuk sampah)</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	975	<p>Bea</p> <p>1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>2. Kendaraan Diatas Air</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	976	Cukai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	977	Pungutan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	978	Bantuan 1. Bantuan Presiden 2. Bantuan Menteri 3. Bantuan Gubernur 4. Bantuan Bupati 5. Bantuan lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	979	Pendapatan lainnya 1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan a. Pelepasan hak atas tanah b. Penjualan rumah jabatan/rumah dinas c. Penjualan kendaraan dinas roda dua d. Penjualan kendaraan dinas roda empat e. Penjualan bongkaran bangunan dan inventaris f. Penjualan drum bekas g. Penjualan hasil penebangan pohon	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		2. Penerimaan jasa giro a. Jasa giro kas daerah b. Jasa giro pemegang kas c. Jasa giro khusus	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		3. Penerimaan bunga bank a. Bunga Deposito b. Bunga Tabungan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR) a. Sumbangan pihak ketiga b. Sumbangan pihak ketiga kendaraan(dealer) c. Sumbangan pihak ketiga kayu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		5. Penerimaan lain-lain a. Penerimaan kembali kredit BKK b. Ternak tidak layak bibit c. Sewa Internet d. Penerimaan dari Dana Bergulir/Revolving e. Kerjasama Dengan BUMIDA f. Penerimaan DUKS g. Tempat rekreasi h. Setoran TP-TGR i. Penerimaan lainnya dari Setda/OPD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		6. Penerimaan bunga bank a. Bunga deposito b. Bunga tabungan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		7. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR) a. Sumbangan pihak ketiga b. Sumbangan pihak ketiga kendaraan(dealer) c. Sumbangan pihak ketiga kayu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		8. Penerimaan lain-lain a. Penerimaan kembali kredit BKK b. Ternak tidak layak bibit c. Sewa Internet d. Penerimaan dari Dana Bergulir/Revolving e. Kerjasama Dengan BUMIDA f. Penerimaan DUKS g. Tempat rekreasi h. Setoran TP-TGR i. Penerimaan lainnya dari Setda/OPD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		9. Penerimaan bunga bank a. Bunga deposito b. Bunga tabungan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		10. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR) a. Sumbangan pihak ketiga b. Sumbangan pihak ketiga kendaraan(dealer) c. Sumbangan pihak ketiga kayu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		11. Penerimaan lain-lain a. Penerimaan kembali kredit BKK b. Ternak tidak layak bibit c. Sewa Internet d. Penerimaan dari Dana Bergulir/Revolving e. Kerjasama Dengan BUMIDA f. Penerimaan DUKS	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> g. Tempat rekreasi h. Setoran TP-TGR i. Penerimaan lainnya dari Setda/OPD 				

B. SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
1	130	PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten 2. Surat Teguran Bupati 3. Monografi 4. Koordinasi 5. Instansi Tingkat Propinsi a. Satuan Kerja perangkat Daerah (termasuk kunjungan kerja, study banding) b. Instansi vertikal	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	131	Bupati, meliputi pengusulan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	132	Wakil Bupati, meliputi pengusulan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	133	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan 1. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang seleksi terbuka Sekretaris Daerah 2. Penetapan Panitia Seleksi Terbuka 3. Pelaksanaan Seleksi Terbuka 4. Hasil Seleksi Terbuka (3 Calon Sekretaris Daerah) diserahkan ke KASN 5. Penetapan 1 calon Sekretaris Daerah untuk dilantik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		6. Serah terima jabatan				
	134	Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopinda) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	135	Pembentukan Daerah 1. Pembentukan Daerah Otonom 2. Pembentukan Wilayah 3. Perubahan Batas Wilayah 4. Pemekaran Wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
		5. Permasalahan/ Perselisihan Daerah (Permasalahan Batas Wilayah) 6. Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota 7. Pemberian dan Penggantian nama kota, daerah, jalan 8. Pembagian Wilayah 9. Penghapusan Wilayah 10. Penggabungan Wilayah 11. Penegasan batas Wilayah 12. Toponimi dan pemetaan Wilayah 13. Kode dan data Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	136	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pemberdayaan Perempuan 2. Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	137	Penyerahan Urusan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan 1. Sambutan/ Pengarahan/Amanat 2. Pembentukan Kecamatan 3. Pemekaran Kecamatan 4. Perluasan / perubahan batas wilayah Kecamatan 5. Pemindahan Ibu Kota Kecamatan 6. Laporan Kecamatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	139	Kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, dan Luar Negeri (Sister City)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
2	140	PEMERINTAH DESA / KELURAHAN				
		Pemerintahan Desa, Kelurahan 1. Kepala Desa / Petinggi, Lurah meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb a. Biaya pemilihan kepala desa / petinggi b. SK bansus Pilpet	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		2. Lembaga kemasyarakatan kelurahan /Desa, meliputi pembedaan keanggotaan kepengurusan dan kegiatannya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Perangkat desa / kelurahan a. Sekretaris kelurahan, sekretaris desa / carik meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara b. Kepala dusun, meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	142	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)				
		1. Aparatur (termasuk penghasilan pamong desa)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Anggaran belanja tambahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Pendapatan desa / kelurahan a. Urusan Desa / kelurahan b. Penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat c. Penerimaan yang berasal dari pemerintah provinsi d. Penerimaan yang berasal dari pemerintah kabupaten / kota	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		e. Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan kepada desa / kelurahan f. Penerimaan dari pemilik- pemilik tanah yang berdomisili di luar desa g. Pendapatan Asli Desa (PAD) h. Hibah dan sumbangan pihak ke tiga				
		4. Penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
		5. Hasil dari gotong royong masyarakat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait
	143	Kekayaan Desa 1. Tanah hak pakai desa (tanah bengkok) 2. Tanah Titisara 3. Tanah penganggonan 4. Tanah desa lainnya 5. Jalan desa 6. Bangunan desa 7. Ambulan desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	144	Lembaga Tingkat Desa 1. Badan Permusyawarahan Desa (BPD) 2. Gapoktan a. Kelompok Tani b. Rukun Tani 3. Dharma Tirta 4. LKMD 5. LMD 6. PKD 7. IPSN 8. Karang Taruna 9. BumDes 10. FKD 11. Kelompok Nelayan 12. Perpustakaan Desa 13. PKK 14. Pokdarwis	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	145	Adminitrasi Desa / Kelurahan : Monografi, Peta Rupabumi, Peta Desa, Profil Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
	146	Kewilayahan 1. Pemekaran Desa / Kelurahan 2. Pembentukan Desa / Kelurahan 3. Perubahan dan Perluasan batas wilayah desa / kelurahan 4. Perubahan nama desa / kelurahan 5. Permasalahan batas desa / kelurahan 6. Penyatuan desa / kelurahan 7. Penghapusan desa / kelurahan 8. Asal usul Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	147	Rembug Desa / Musyawarah Kelurahan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	148	Pembangunan Desa / Kelurahan				
		1. Pemberdayaan Masyarakat Kota	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Perekonomian Desa / Kelurahan (Usahan-Usaha desa / kelurahan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Prasarana desa / kelurahan a. Pemukiman Kembali Penduduk b. Masyarakat pradesa c. Pemugaran Perumahan dan lingkungan desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Pengembangan Desa / keluarahan a. Tingkat perkembangan desa b. Tata desa c. Perlombaan Desa / Kelurahan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Koordinasi a. Rakor Petinggi, Carik, Perangkat Desa, Tk. Kecamatan b. Rakor Petinggi, Carik, Perangkat Desa, Tk. Kabupaten c. Kerjasama Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	149	RT – RW / RK	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
3	170	DPRD KABUPATEN				
	171	Keanggotaan				
		1. Pencalonan				Kewenangan Pusat
		2. Pengangkatan dan pengambilan sumpah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Pelanggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Pemberhentian antar waktu a. Recall b. Meninggal dunia c. Mengundurkan diri d. Diberhentikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Alat Kelengkapan Dewan a. Pimpinan b. Badan Musyawarah c. Komisi d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) e. Badan Anggaran f. Badan Kehormatan g. Alat Kelengkapan lain (Pansus, Panja)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	172	Persidangan 1. Rapat – rapat a. Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa b. Rapat Pimpinan DPRD c. Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus d. Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi e. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum f. Rapat Fraksi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Fraksi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Tata tertib	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Kode Etik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Reses	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		6. Peninjauan / Kunjungan lapangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		7. Kunjungan kerja / study banding / konsultasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	173	Kesejahteraan 1. Keuangan 2. Penghargaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	174	Hak	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	176	Kehumasan, Protokol dan Dokumentasi DPRD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	177	Fasilitasi Aspirasi Masyarakat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	178	Produk Hukum DPRD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	179	Penyusunan Peraturan Daerah a. Naskah Akademik b. Draft Peraturan Daerah c. Risalah d. Notulen Rapat Pembahasan Peraturan Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
4	180	HUKUM 1. Konsitusi a. Dasar Negara b. Undang-undang dasar	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Peraturan Perundang - udangan a. Tap MPR b. Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah / Provinsi f. Peraturan Kabupaten g. Peraturan Menteri h. Peraturan Gubernur i. Peraturan Bupati j. Peraturan Desa k. Peraturan Petinggi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Keputusan a. Keputusan Presiden b. Keputusan Menteri c. Keputusan Lembaga Non Kementrian d. Keputusan Gubernur e. Keputusan Bupati f. Keputusan Petinggi g. Keputusan Bersama	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Instruksi a. Instruksi Presiden b. Instruksi Menteri c. Lembaga Non Kementrian d. Instruksi Gubernur e. Instruksi Bupati f. Instruksi Kepala Desa / Petinggi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Kajian Hukum / Peraturan Perundang-Undangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		6. Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		7. Kejaksaan a. Penuntut umum b. Penuntut khusus				Kewenangan Pusat
		8. Hak Azasi Manusia (HAM) a. Rencana Aksi Nasional HAM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	181	Perdata 1. Agraria / Pertanahan 2. Rumah 3. Utang Piutang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	182	MOU / Nota Kesepahaman	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	183	Perjanjian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	184	Pidana (penyidik Pegawai Negeri Sipil)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	185	Peradilan				
		1. Upaya Hukum a. Banding b. Kasasi c. Perlawanan pihak Ketiga (Derden Verzet) d. Peninjauan Kembali	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Eksekusi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Pembinaan / Penyuluh Hukum (pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan produk hukum daerah)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Bantuan Hukum (Lembaga Bantuan Hukum) a. Pendampingan permasalahan Hukum Pidana b. Advokasi Bidang Keperdataan Dan Tata Usaha	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		c. Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	187	Hukum Adat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	188	Hukum Tata Negara	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	189	Hukum Administrasi Negara	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI / HUBUNGAN INTERNASIONAL				
5	197	Kunjungan ke luar negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	198	Bantuan ke luar negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
6	200	POLITIK				
	201	Perencanaan dan Program dan Pembinaan Politik Luar Negeri				
		1. Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Kesatuan Bangsa Organisasi Kekuatan Sosial Politik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		3. Wawasan kebangsaan a. Pelestarian nilai-nilai pahlawan b. Pembinaan kesatuan bangsa c. Peningkatan semangat nasionalisme	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		4. Organisasi Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		5. Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk Laporan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	6. Keadaan Politik Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		7. Pemberitahuan Keadaan Bahaya dan jam malam meliputi Pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		8. Hasil Evaluasi dan tata mengenai Ipoleksosbud, Hankam	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		9. Orde baru	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		10. Orde reformasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		11. PARTAI POLITIK				
		a. Pendirian / Pembentukan PARPOL	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		b. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PARPOL	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
		c. Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		d. Pembinaan PARPOL	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		e. Hasil Munas / Musda PARPOL	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
		f. Struktur / Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		g. Data Inventaris dan Keuangan PARPOL	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
		h. Bantuan Keuangan Parpol	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
		11. Organisasi Terlarang a. Keputusan Perubahan Partai / Organisasi terlarang b. Daftar dan data pengurus anggota organisasi terlarang	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
		12. Ijin meninggalkan tempat atau berdomisili bagi anggota organisasi terlarang	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		13. Daftar berkala mengenai keadaan organisasi terlarang	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
		14. Laporan umum mengenai keadaan anggota organisasi terlarang	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	202	Organisasi Kemasyarakatan 1. Pembentukan organisasi 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 3. Kepengurusan dan daftar anggota organisasi 4. Program Kerja organisasi 5. Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Pembinaan organisasi 7. LaporanKegiatan Organisasi 8. Pembinaan Organisasi a. Kegiatan Organisasi b. Daftar inventaris kekayaan organisasi c. Lembaga Swadaya Masyarakat d. Pembentukan Organisasi e. Kepengurusan dan dafar anggota organisasi f. Kepengurusan dasar dan daftar anggota organisasi g. Program Kerja Organisasi h. Laporan Kegiatan Organisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
7	210	KEPARTAIAN				
	211	Partai Peserta Pemilu 1. Peserta Pemilu dan /atau Pilkada a. Lambang dan Nama Partai Politik b. Daftar Calon Tetap c. Partai Politik Pengusung Calon Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang / Bagian Instansi terkait
	212	1. Pencalonan :				
		a. Administrasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang / Bagian Instansi terkait
		b. Tes kesehatan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Nomor Urut Calon : a. Nomor urut partai politik b. Nomor urut calon Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang / Bagian Instansi terkait
	213	Alat / Media Publikasi Pemilu : 1. Informasi jumlah/ rekapitulasi daftar pemilih tetap 2. Informasi partai politik peserta Pemilu 3. Informasi denah TPS 4. Informasi tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara 5. Informasi tingkat partisipasi masyarakat 6. Infomasi perolehan suara	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang / Bagian Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	214	Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (berupa laporan penyelenggaraan) 1. Buku laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pilkada	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang / Bagian Instansi terkait
	215	Dana Kampanye : Rincian bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	216	Daftar Pemilih : 1. Rincian Daftar pemilih Sementara 2. Rincian Daftar Pemilih Tetap	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	217	Sarana dan Prasarana Pemilu dan Pilkada (Bilik Suara) 1. Bilik suara Aluminium	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang / Bagian Instansi terkait
	218	Penghitungan Suara 1. Rekapitulasi perolehan penghitungan suara calon presiden dan wakil presiden 2. Rekapitulasi perolehan penghitungan suara partai politik dan calon legislatif 3. Rekapitulasi perolehan penghitungan suara Dewan Perwakilan Daerah 4. Rekapitulasi perolehan penghitungan suara calon kepala daerah 5. Hasil Pemilu dan Pilkada (Penetapan Calon Terpilih): Penetapan calon terpilih	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang / Bagian Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	219	Aduan / Pelanggaran Pemilu / Kasus-Kasus Perselisihan hasil Pemilihan Umum :				
		1. Bukti persidangan 2. Identitas saksi persidangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Putusan hasil persidangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang / Bagian Instansi terkait
8	220	ORGANISASI KEMASYARKATAN				
	221	Berdasarkan Perjuangan 1. Perintis Kemerdekaan 2. Angkatan 45 3. Veteran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	222	Berdasarkan Kekaryaan 1. PEPABRI 2. Wredatama 3. Pensiunan PNS	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	223	Berdasarkan Kerohanian Islam 1. Muhammadiyah 2. NU 3. Persatuan Sarikat Islah 4. Lembaga lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	224	Berdasarkan Kerohanian Kristen	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	225	Berdasarkan Kerohanian Katolik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
					kinerja Perangkat Daerah	
	226	Berdasarkan Kerohanian Hindu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	227	Berdasarkan Kerohanian Budha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
9	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				
	231	Ikatan Profesi Kesehatan 1. Ikatan Dokter Indonesia 2. Ikatan Bidan Indonesia 3. Ikatan Perawat Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	232	Organisasi Profesi Guru 1. Persatuan Guru Republik Indonesia 2. Ikatan Guru TK Indonesia 3. Persatuan Lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	234	Persatuan Advokat Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	235	Lembaga Badan hukum	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	236	Korps Pegawai Republik Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	237	Persatuan Wartawan Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	238	Ikatan Arsiparis Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	239	Ikatan Pustakawan Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian / Bidang Instansi terkait
10	240	ORGANISASI PEMUDA				
	241	Komite Nasional Pemuda Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	242	Organisasi Mahasiswa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	243	Organisasi Pelajar	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	244	Gerakan Pemuda ANSOR	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	246	Gerakan Pemuda Marhaenis	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	247	Ikatan Notaris Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	248	Organisasi Lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
11	250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN PENGUSAHA				
	251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	252	Organisasi Buruh Internasional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	253	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
					kinerja Perangkat Daerah	
	255	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	256	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	257	Asosiasi Pengusaha Mebel	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
12	260	ORGANISASI WANITA				
	261	Darma Wanita	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	262	Kongres Wanita Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	263	Persatuan Wanita Republik Indonesia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	264	Gerakan Organisasi Wanita (GOW)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	265	Ikatan Wanita Pengusaha Wanita (IWAPI)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	266	PKK	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
13	270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH) 1. Buku laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/ atau Pilkada				Kewenangan Pusat
	271	Pencalonan 1. Administrasi (profil) 2. Tes kesehatan				Kewenangan Pusat
	272	Nomor urut / tanda gambar				Kewenangan Pusat
	273	Kampanye 1. Dana kampanye				Kewenangan Pusat
	274	Petugas pemilu 1. Daftar penyelenggara pemilu				Kewenangan Pusat
	275	Pemilih / daftar pemilih 1. Rincian daftar pemilih sementara 2. Rincian daftar pemilih tetap				Kewenangan Pusat
	276	Sarana 1. Bilik suara alumunium				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	277	Pemungutan suara / penghitungan suara 1. Rekapitulasi perolehan penghitungan suara calon presiden dan wakil presiden 2. Rekapitulasi perolehan penghitungan suara partai politik dan calon legislatif 3. Rekapitulasi perolehan penghitungan suara Dewan Perwakilan Daerah 4. Rekapitulasi perolehan penghitungan suara calon kepala daerah 5. Hasil Pemilu dan Pilkada (Penetapan Calon Terpilih): Penetapan calon terpilih				Kewenangan Pusat
	278	Hasil pemilu 1. Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif 2. Penetapan pemenang pilkada				Kewenangan Pusat
	279	KPU / KPUD 1. Profil dan struktur organisasi				Kewenangan Pusat
14	280	PENGAWASAN PEMILU (PANWASLU)				Kewenangan Pusat
	281	Pelanggaran Pemilu				Kewenangan Pusat
	282	Pemantau Pemilu				Kewenangan Pusat
	283	Sengketa Pemilu				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	284	Pengawas Pemilu 1. Bawaslu 2. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) 3. Panitia Pengawas Desa (PPD) 4. Pengawas TPS				Kewenangan Pusat
	285	Indeks Kerawanan Pemilu				Kewenangan Pusat
15	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		1. Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan 2. Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan 3. Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman keamanan/ ketertiban umum 4. Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan 5. Laporan dari Instansi yang berwenang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		6. Laporan dari kejadian adanya teroris	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		7. Pengamanan sidang (tamu negara) 8. Pengawasan pejabat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	301	Koordinasi dan Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
				pengawas,serta penegak hukum		
	302	Pengawasan Trantibum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	303	Penegakan Pelaksanaan Perda dan Perbup 1. Tindak Lanjut Hasil Penertiban / Penegakan Perda dan Perbup 2. Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perbup 3. Pembinaan, fasilitasi dan pengembangan PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	304	Pembinaan/Penyuluhan pelanggaran Perda	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	305	Patroli Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	306	Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing 1. Pengamanan 2. Pengawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
				pengawas,serta penegak hukum		
	308	Pencegahan dan Pemberantasan penggunaan dan peredaran narkoba	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	309	Kegiatan pengembangan pelaksanaan HAM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
16	310	PERTAHANAN				
	316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
17	320	KEMILITERAN / TNI				
	325	Kemanunggalan TNI dengan Rakyat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
18	330	KEAMANAN				
	331	Polisi Pamong Praja (Laporan Kehilangan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	332	Huru-hara/Demonstrasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	334	Bahan Peledak 1. Petasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	335	Perjudian 1. Penyakit Masyarakat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	336	Surat-surat kaleng	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	337	Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	338	Himbauan atau Larangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
19	340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)				
		1. Kebijakan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	341	Pembinaan dan Diklat 1. Pengangkatan/ pemberhentian anggota Linmas 2. Pendidikan/ latihan Linmas 3. Pelatihan PAM Swakarsa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	342	Pengerahan dan pengendalian Linmas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas 1. Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas 2. Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas 3. Santunan uang duka bagi anggota Linmas 4. Penghargaan bagi anggota Linmas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	345	Orientasi Kesadaran Bela Negara	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas 1. Kegiatan Bina Potensi Masyarakat 2. Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
20	360	BENCANA				
		1. Pelatihan 2. Surat Keputusan 3. Berita Acara	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		4. Assesment Kejadian Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		5. Monitoring Lapangan berkaitan dengan momen khusus (tahun baru, hari besar)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		6. Jenis-jenis peralatan Penanggulangan Bencana (PB) Logistik a. Pinjam Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		7. Logistik a. Stok Opname Logistik b. Permohonan Bantuan Logistik dan Peralatan ke Provinsi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		8. Evakuasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		9. EWS (<i>Early Warning System</i>)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	361	Gunung Berapi / Gempa / Tsunami / Gelombang Pasang / Abrasi / Kegagalan Teknologi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	362	Banjir / Tanah Longsor	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	363	Angin Topan / Angin Puting Beliung	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	364	Kebakaran 1. Pemadam Kebakaran a. Pencegahan kebakaran b. Pendataan gedung rawan Kebakaran c. Pengembangan sistem metode peralatan kebakaran d. Pengembangan personil dalam upaya penanggulangan kebakaran e. Pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		f. Pelaksanaan operasional pemadam kebakaran g. Pengujian kelayakan alat pemadam kebakaran h. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran i. Satuan Pelaksana Kebakaran 1. Penanganan Kebakaran/Evakuasi binatang berbahaya/pohon tumbang /banjir /kekeringan 2. Laporan Kejadian Hasil Penanganan				
	365	Kekeringan 1. Dropping air bersih	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	366	Posko Bencana 1. Data Rawan Bencana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	367	Koordinasi / Unsur Pengarahan Penanggulangan Bencana 1. Apel Kesiapsiagaan Bencana 2. Rakor Penanggulangan Bencana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	368	MOU Pemerintahan Pusat BNPB	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	369	Kejadian Khusus / Kejadian Luar Biasa / Musibah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
				pengawas,serta penegak hukum		
21	370	KECELAKAAN (Klasifikasi disini SAR)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	371	Latihan SAR (Search And Rescue)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	372	Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam a. Latihan Mitigasi Bencana b. Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	373	Pelatihan manajemen bagi pejabat 1. Penanggulangan bencana bagi pejabat struktural	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	374	Pelatihan Penanggulangan Bencana 1. Penanggulangan Bencana Inklusi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	375	Pelatihan kemampuan Pusdalops bagi aparat PBP (Pelaksana Bencana dan Pengungsi)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	376	Latihan ketrampilan pemadam kebakaran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	377	Kecelakaan Darat, Laut, Udara a. Kecelakaan Transportasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	378	Investigasi / penyelidikan kecelakaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	379	Asuransi Kecelakaan (pada saat evakuasi relawan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
22	380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	381	Perencanaan 1. Perencanaan teknis 2. Rekomendasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	382	Bantuan Bencana 1. Bantuan Logistik (Bencana)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Bantuan Sosial Tunai , Non Tunai	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	383	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	385	PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi) 1. Pelatihan Kemampuan Pusdalop BPBD 2. TRC	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	386	Kunjungan lapangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	387	Relawan 1. Satgas SAR	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	388	Laporan Bencana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	389	Penanggulangan Bencana Pasca Bencana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
23	390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	391	Instansi Pemerintah Pusat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	392	Instansi Pemerintah Daerah / Propinsi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	393	Lembaga Internasional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	394	Lembaga Non Pemerintah Nasional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	395	Pihak Lain	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
24	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2. Beras untuk rakyat miskin (Raskin) 3. Kartu keluarga sejahtera (KKS)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
25	410	PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN				
	411	Pembinaan Gotong-royong 1. Swadaya gotong royong a. Penataan Gotong royong b. Pungutan 2. Lembaga Desa / Kelurahan a. Pembinaan b. Klasifikasi c. Kegiatan d. Musyawarah 3. Latihan kerja masyarakat a. Kader Masyarakat b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) c. Pusat Latihan d. Kursus-Kursus e. Kurikulum / Sylabus f. Keterampilan g. Balai Latihan Kerja 4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) a. Program b. Pembinaan Organisasi c. Kegiatan d. Laporan 5. Penyuluhan a. Publikasi b. Peragaan c. Siaran Pedesaan d. Penyuluhan Lapangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		6. Kelembagaan Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok tani, b. Darma tirta c. LKMD d. LMD e. FKD f. IPSM g. Karang Taruna h. BumDes i. Kelompok Nelayan j. Perpustakaan Desa k. PKK l. Pokdarwis 7. Desa Mandiri Energi Bio Gas 8. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	412	Perekonomian Desa / Kelurahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan b. Pemasaran 2. Keuangan Desa (Pembiayaan Pembangunan Desa) <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi Data b. Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan c. Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan d. Bantuan / Stimulasi e. Perkreditan Desa f. Pelaporan 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
			Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		g. Program Nasional h. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Koperasi Usaha a. Badan Usaha Unit Desa (BUUD) b. Koperasi Unit Desa (KUD)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Penataan Bantuan Pembangunan Desa a. Jumlah Desa yang diberi bantuan b. Pengarahan c. Pusat d. Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Alokasi Bantuan Pembangunan Desa a. Pusat b. Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		6. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa /Keluarahan a. Bantuan Langsung b. Bantuan Keserasian c. Bantuan juara lomba desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	413	Sarana dan Prasarana Desa / Kelurahan 1. Prasarana Desa a. Pembinaan b. Bimbingan Teknis 2. Pemukiman kembali penduduk a. Lokasi b. Pelaksanaan 3. Masyarakat Pradesa a. Pembinaan b. Penyuluhan 4. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa a. Rumah Sakit b. Proyek Perintis Pelaksanaan c. Pengembangan d. Perbaikan Kampung e. Teknologi Tepat Guna	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	414	Pengembangan Desa 1. Tingkat Perkembangan Desa a. Jumlah desa b. Pemekaran desa c. Pembentukan desa baru d. Evaluasi e. Bagian f. Batas Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Tata Desa / Profil Desa / Kelurahan a. Inventarisasi b. Penyuluhan Tata Desa c. Pemetaan d. Pedoman Pelaksanaan e. Evaluasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Perlombaan Desa dan Kelurahan a. Pedoman b. Penilaian c. Kejuaraan d. Piagam, Piala	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	415	Koordinasi 1. Sektor Khusus (K) 2. Rapat Koordinasi Horisontal 3. Tim Koordinasi Pusat (TKP) 4. Kerjasama a. Luar Negeri (UNICEF) b. Perguruan Tinggi c. Kementrian / Lembaga Pemerintah d. Lembaga Lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	416	Upacara / Tradisi Desa – Kelurahan 1. Sedekah Bumi 2. Obor-Obor 3. Lomba 4. Manganan 5. Baratan 6. Seni budaya Desa Lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
26	420	PENDIDIKAN 1. Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Pendidikan 2. Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb 3. Pendidikan kemasyarakatan 4. Dewan pendidikan kabupaten 5. Komite sekolah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		6. Ijin pendirian, penggabungan dan pencabutan sekolah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
	421	Sekolah (Termasuk Akreditasi) 1. Pra Sekolah (PAUD, Playgroup) 2. Sekolah Dasar 3. Sekolah Menengah 4. Sekolah Kejuruan 5. Sekolah Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas Dll) 6. Kegiatan Sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum 7. Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba (LKS, Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga Dan Sains), Pelajar Teladan, Petukaran Pelajar	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		8. Sekolah Pendidikan Luar Biasa				Kewenangan Provinsi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		9. Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf 10. Pendidikan non formal (Kursus dan kelembagaan) 11. Sekolah Berprestasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
	422	Administrasi Sekolah 1. Persyaratan Masuk Sekolah,Testing, Ospek 2. Tahun Pelajaran 3. Hari Libur 4. Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI 5. Bea siswa dan Penghargaan siswa Berprestasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		6. Ijazah,SKHU, Surat Keterangan Lulus, Sertifikat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		7. Bantuan pendidikan : Bantuan 8. Operasional Sekolah (BOS), KIP, dll 9. Pindah Sekolah 10. Unit Produksi Sekolah 11. Kalender pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		12. DAPODIK	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	423	Metode belajar 1. Kuliah 2. Ceramah, Simposium, Seminar 3. Daring / Online 4. Diskusi 5. Kuliah Lapangan, KKN (Praktek Industri) 6. Kurikulum 7. Karya Tulis, Karya Ilmiah 8. Ujian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
	424	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, Guru / Dosen Teladan, Guru / Dosen Berprestasi) 1. Pertukaran Guru ke Luar Negeri 2. Sertifikasi Guru 3. Kegiatan-Kegiatan Guru	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	425	Sarana Pendidikan 1. Bangunan pendidikan a. Gedung Sekolah b. Kampus c. Pusat Kegiatan d. Perpustakaan e. Laboratorium 2. Buku 3. Perlengkapan Pendidikan/Sekolah 4. Sistem Informasi Pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Pengembangan Teknologi Informasi 6. Koperasi Sekolah 7. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	426	<p>KEOLAHRAGAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Keolahragaan <ol style="list-style-type: none"> a. Olahraga Pendidikan (POPDA SD, Porseni, dll) b. Olah Raga Rekreasi/Massal (Senam, Sepeda santai, olahraga tradisional) c. Iptek dan Industri Olah Raga 2. Sarana Prasarana Keolahragaan <ol style="list-style-type: none"> a. Gedung olah raga b. Stadion c. Lapangan d. Kolam renang 3. Kemitraan Olahraga 4. Hobi 5. Seleksi olah raga prestasi 6. Pengiriman peserta kejurda olah raga pelajar 7. Pengembangan sentral keolahragaan untuk pendidikan atlet olah raga 8. Penghargaan 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	427	<p>KEPEMUDAAN</p> <p>Meliputi Organisasi dan Kegiatan remaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran Pemuda 2. Paskibraka 3. Sarana prasarana kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja 4. Kemitraan Pemuda 5. Karang Taruna 6. Pelatihan siswa dan pelajar 7. Penyelenggaraan kemah bhakti pemuda 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		8. Lomba - lomba 9. Festival seni pemuda pelajar 10. Pembinaan kelompok wisata pemuda 11. Pembinaan kelompok pecinta alam				
	428	Kepramukaan / Kepanduan 1. Kegiatan Kepramukaan 2. Kenaikan Tingkat 3. Sarana Prasarana Kepramukaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
27	430	KEBUDAYAAN				
		1. Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan 2. Pembinaan bidang kebudayaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		3. Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	431	Kesenian 1. Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll) 2. Sarana a. Gedung Kesenian b. Padepokan c. Lembaga Adat d. Kegiatan adat/tradisi 3. Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan : festival, pentas seni 4. Dewan Kesenian Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	432	Kepurbakalan 1. Museum 2. Peninggalan Kuno a. Candi, termasuk pemugaran b. Benda Kuno c. Benda Cagar Budaya 3. Tempat Bersejarah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	433	Sejarah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	434	Bahasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	435	Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
28	440	KESEHATAN				
		1. Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		2. Perijinan Fasilitas Kesehatan a. Standar Operasional Prosedur (SOP)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		b. Dokumen Perijinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		3. Perijinan Tenaga Kesehatan a. Standar Operasional Prosedur (SOP)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		b. Dokumen Perijinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
	441	Pembinaan Kesehatan 1. Gigi 2. Mata 3. Jiwa 4. Kanker 5. UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) 6. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) 7. Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan,Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, penyuluhan kesehatan, dsb 8. Kesehatan Ibu dan Anak a. Kesehatan ibu (Data Pelayanan Kesehatan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		b. Kesehatan ibu (Data kematian <i>by name by address</i>)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		c. Kesehatan Bayi dan Balita (Data Pelayanan Kesehatan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		d. Kesehatan Bayi dan Balita (Data kematian <i>by name by address</i>)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		e. Kesehatan Remaja f. Kesehatan Usia Lanjut dan Pra Usia Lanjut 9. JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan) a. JAMKESMAS b. JAMKESDA c. JAMPERSAL d. Kartu Indonesia Sehat e. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) f. Jaminan lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
	442	Obat-Obatan 1. Pengadaan 2. Penyimpanan Obat 3. Distribusi Obat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Pengawasan Obat a. Obat Terdaftar b. Obat Terlarang c. Obat tanpa izin edar d. Bahan kimia lainnya e. Kosmetik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		5. Pelayanan Obat/farmasi 6. Pemusnahan Obat 7. Pencatatan dan pelaporan Obat-obatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
	443	Pemberantasan dan pencegahan Penyakit 1. Pencegahan Penyakit	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		2. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L) a. Kusta b. Kelamin,HIV,AIDS,IMS c. Frambusia d. TBC e. Hepatitis f. Thypoid	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Epidomiology, Karantina, Imunisasi, Survailense, dll a. Kholera b. Antrak	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		c. Leptosirosis d. Chikungunya	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		e. SARS	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		f. Flu Burung (Avian Influenza) g. COVID-19 h. Diare	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		a. Malaria b. Dengeue Haemorrhagie Fever (DHF), DBD c. Filaria d. Serangga e. Rabies f. Penyakit lainnya	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular a. Pektoris b. IMA (Irama Mastcmik Akut) c. Hipertensi d. Stroke	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		e. Diabetes Melitus f. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks g. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Mammae h. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Hepar i. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Paru dan penyakit lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		j. Penatalaksanaan Indera Pada Usia Dini/Anak k. Penatalaksanaan Kesehatan Jiwa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		l. Pembinaan Usia Produktif dan Lansia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		6. Higiane Sanitasi a. Tepat tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), Jasa Boga b. Sarana air minum c. Pestisida, insektisida d. Pencemaran Udara e. Jamban keluarga, sanitasi rumah tangga	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		f. Kesehatan institusi, misal: Poskestren, sanitasi masjid, dll g. Higiane sanitasi CA. Mammae h. Higiane sanitasi CA. Hepar i. Higiane sanitasi CA. Paru	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		7. Kejadian Khusus a. Dekompensasi kardiogenik (serangan jantung) b. Asma	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		c. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		d. Psikosis e. Penyakit Paru Obstruktif Menahun (PPOM) f. Kecelakaan Lalu Lintas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		g. Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		h. Pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		i. Pelayanan kesehatan matra (kesehatan haji, umrah, arus mudik)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		444	Gizi dan Pengawasan Makanan 1. Kekurangan Makanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		2. Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi buruk a. Data gizi buruk <i>by name by address</i>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		b. Data pelayanan kelaparan, busung lapar, gizi buruk c. Keracunan makanan d. Menu makanan rakyat e. Gondok endemik (GAKI) f. Pengawasan terhadap makanan dan minuman dari bahan berbahaya g. Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi h. Kewaspadaan Gizi i. Penanggulangan Masalah Gizi j. Pengelolaan Konsumsi Gizi k. Perbaikan Gizi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
	445	RSU,RSJ,RS Khusus				
		1. Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum) a. Rawat Jalan b. Rawat Inap c. IGD d. IBS (Instalasi BedahSentral) e. ICU f. MCU (Medical Check Up) g. PICU NICU (ICU Anak-anak)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		2. Penunjang Medis a. Farmasi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		b. Rekam Medik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		c. Radiologi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		d. Gizi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		e. Laboratorium Klinik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		f. Laboratorium patologi anatomi, Forensik, Mikrobiologi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		g. Bank Darah Rumah Sakit	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		h. Sanitasi Rumah sakit	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		i. Kesehatan Lingkungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		j. CSSD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		k. <i>Loundry</i>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		l. Elektromedik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		6. SPI (Satuan Pengawas Internal)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		7. Mutu Rumah sakit a. Akreditasi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		8. IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		9. Promosi Layanan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		10. Kasus Hukum Rumah Sakit	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		11. Dewan Pengawas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat ,bagian bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		12. Pengawasan Eksternal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		13. Penanganan Pengaduan pasien	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	446	Tenaga Medis				
		1. Perencanaan Tenaga Medis a. Surat Ijin Praktek (SIP) b. Surat Ijin Kerja (SIK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Diklat Tenaga Medis dan Paramedis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	447	Peralatan Kesehatan 1. Pengadaan 2. Standarisasi 3. Pelayanan 4. Distribusi 5. Perijinan berkaitan dengan alat kesehatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	448	Pengobatan Alternatif 1. Akupresur 2. Keterampilan 3. Ramuan 4. Obat tradisional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
	449	Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan 1. PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling a. Akreditasi b. Sertifikasi Puskesmas c. Ijin Operasional Puskesmas 2. Klinik 3. Rumah Sakit 4. Laboratorium Kesehatan 5. Apotik 6. Sanatorium Kesehatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait
		7. Lembaga Penyedia Jasa Lainnya 8. PMI / Unit Transfusi Darah 9. Kegawatdaruratan dan Public Safety Center (PSC) 10. Pelayanan Kesehatan a. Standarisasi b. Akreditasi c. Rekomendasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan d. Penanganan Krisis Kesehatan e. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
29	450	AGAMA 1. Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
		2. Bantuan di bidang keagamaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Kerjasama di bidang keagamaan (Forum Komunikasi Umat Beragama) 4. Laporan di bidang keagamaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	451	Islam 1. Peribadatan a. Sholat b. Zakat, Fitrah, Infaq, Shodaqoh c. Puasa 1. Tarawih Keliling 2. Safari Ramadhan 2. Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
		3. Tokoh Agama 4. Pendidikan Agama a. Pendidikan Tinggi Agama b. Menengah, MTs, MA c. Dasar, Pra Sekolah, MI d. Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll) e. Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll f. Tenaga Pengajar	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		g. Dakwah (Pengajian, MTQ) 5. Harta Agama Wakaf, Baitulmal,dsb 6. Mazhab Agama Islam 7. Organisasi keagamaan bukan politik (Majlis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll) 8. Tokoh agama, Rohaniawan (Da'i) 9. Kegiatan : a. Istighosah b. Mujahadah c. Khataman Al qur'an d. Safari jum'at e. Dll				
	452	Kristen Protestan 1. Peribadatan 2. Rumah Ibadah gereja dll 3. Tokoh Agama, Rohaniawan 4. Organisasi Gerejani 5. Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARAWI) 6. Sidang Raya Sinode	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	453	Khatolik 1. Peribadatan 2. Rumah Ibadah gereja dll 3. Tokoh Agama, Rohaniawan 4. Organisasi Gerejani	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	454	Hindu 1. Peribadatan 2. Rumah Ibadah Pura dll 3. Tokoh Agama, rohaniawan 4. organisasi Agama Hindu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	455	Budha 1. Peribadatan 2. Rumah Ibadah Candi, Vihara, dll 3. Tokoh Agama, Rohaniawan 4. Organisasi Agama Budha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	456	Kong Hu Cu 1. Peribadatan 2. Rumah Ibadah klenteng dll 3. Tokoh Agama, Rohaniawan 4. Organisasi Agama kong Hu Cu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	457	Urusan Haji 1. Manasik Haji 2. Pemberangkatan dan Pemulangan Haji	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	458	Bidang Kesejahteraan Sosial				
		1. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Bantuan Sosial kepada badan/lembaga, kelompok masyarakat, ormas dan individu atau keluarga 3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi hibah dan bansos 4. Rakor Pengurus Panti Asuhan dan social 5. Rakor penyandang Disabilitas 6. Rakor Peningkatan Pemberdayaan Lansia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		7. Rakor peningkatan Kesehatan Lingkungan Desa 8. Rakor Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan bagi guru UKS				
	459	Bidang Kesejahteraan Masyarakat 1. Fasilitasi bantuan Pendidikan dan Koordinasi di Bidang 2. Fasilitasi dewan Pendidikan 3. Fasilitasi Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP) 4. Fasilitasi Badan Koordinasi TPQ 5. Fasilitasi Lomba Bidang PAI 6. Fasilitasi Pembinaan Olah Raga dan Pramuka 7. Penyelenggaraan Festival anak sholeh 8. Fasilitasi Dian Dharma	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
30	460	SOSIAL	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	461	Rehabilitasi Penyandang Cacat 1. Cacat Mata 2. Cacat Ganda 3. Cacat Fisik 4. Cacat Mental 5. Bisu / Tuli	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	462	Tuna Sosial / Rehabilitasi Sosial 1. Gelandangan / Orang terlantar, anak jalanan 2. Pengemis 3. Tuna sosial 4. Anak Nakal 5. Tuna Wisma	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	463	Kesejahteraan Anak dan Keluarga 1. Kesejahteraan Anak a. Pengharusutamaan Hak- Hak Anak (PUHA) b. Perlindungan Anak c. Anak Asuh 2. Kualitas Hidup Perempuan a. Perlindungan Perempuan b. Ibu Teladan c. Pengharusutamaan Gender (PUG)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	464	Keperintisan dan Kepahlawanan 1. Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya. 2. Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan. 3. Cacat Veteran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	465	Kesejahteraan Sosial 1. Lanjut Usia 2. Korban Kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi 3. Program Keluarga Harapan (PKH)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	468	PMI				
		1. Data Relawan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Data pelayanan kesehatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		3. Layanan darah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		4. Donor darah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		5. Data Pendonor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		6. Stok Darah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		7. Data Golongan darah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		8. Hasil pengecekan darah	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		9. Sarana dan prasarana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		10. Laboratorium	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		11. Bantuan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		12. Pembinaan/penyuluhan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		13. Publikasi kepalangmerahan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	469	Makam 1. Pahlawan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	7	8	
31	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
		1. Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang kependudukan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait	
	471	PENDAFTARAN PENDUDUK					
		1. Identitas Penduduk a. Biodata Penduduk b. Nomor Induk Kependudukan c. KTP Elektronik d. Kartu Keluarga	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait	
		2. Buku-buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait	
		3. Laporan Tahunan Pendaftaran Penduduk	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait	
		4. Perpindahan Penduduk a. Perpindahan Penduduk WNI b. Pendaftaran Pindah Datang orang asing Dalam Wilayah NKRI c. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara d. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait	
5. Peristiwa Penting Kependudukan Lainnya a. Perubahan Gender	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait			

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	472	Pencatatan Sipil				
		1. Pencatatan Kelahiran Kematian a. Pencatatan Kelahiran 1. Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI 2. Pencatatan Kelahiran WNI Diluar Domisili Ibu 3. Pencatatan Kelahiran Orang Asing	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		4. Pencatatan Kelahiran bagi Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya atau Keberadaan Orangtuanya 5. Pencatatan kelahiran di Luar Wilayah NKRI 6. Pencatatan Lahir Mati b. Pencatatan Kematian 1. Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI 2. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		2. Pencatatan Perkawinan, Perceraian a. Pencatatan Perkawinan Non Islam 1. Perkawinan di Wilayah NKRI 2. Perkawinan di Luar Wilayah NKRI 3. Pencatatan Pembatalan Perkawinan b. Pencatatan Perceraian Non Islam c. Pencatatan Pembatalan Perceraian	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta a. Pencatatan Pengangkatan Anak b. Pencatatan Pengakuan Anak c. Pencatatan Pengesahan Anak d. Pencatatan Perubahan Akta e. Pencatatan Pembatalan Akta	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		4. Pencatatan Perubahan Nama	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		5. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan a. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah NKRI b. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA ke WNI di Luar Wilayah NKRI	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		6. Pembedulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil a. Pencatatan Pembedulan Akta Pencatatan Sipil b. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		7. Buku-buku yang digunakan Dalam Pencatatan Sipil	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		8. Register Akta-akta Pencatatan Sipil a. Register Akta Kelahiran b. Register Akta Perkawinan c. Register Akta Perceraian d. Register Akta Kematian e. Register Pengakuan Anak	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		9. Laporan Tahunan Pencatatan Sipil	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
	473	Informasi Kependudukan				
		1. Teknologi informasi 2. Pengolahan data kependudukan a. Pendaftaran penduduk b. Kejadian vital penduduk c. Penduduk non registrasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Pelayanan informasi kependudukan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	474	Perkembangan pendudukan 1. Pengarahan Kuantitas Penduduk a. Struktur Jumlah b. Komposisi c. Fertilitas d. Kesehatan Reproduksi e. Morbiditas Penduduk f. Mortalitas Penduduk	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		2. Pengembangan Kuantitas Penduduk a. Anak dan remaja b. Penduduk usia produktif c. Penduduk lanjut usia d. Gender	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	475	Transmigrasi				
		1. Penyiapan informasi daerah transmigrasi a. Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		b. Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi c. Permasalahan/ sosialisasi transmigrasi d. Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi e. Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian f. Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi g. Kerjasama di bidang transmigrasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		h. Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		2. Pemukiman transmigrasi a. Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi b. Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi c. Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi d. Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/ peta informasi pemukiman e. Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum /social dan jaringan transportasi f. Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		g. Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi h. Tata ruang pemukiman transmigrasi 1) Rancangan dan pemanfaatan areal tanah 2) Rancangan Kapling TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri)				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3) Pengukuran dan Pembagian lahan dan pekarangan lahan usaha dan fasilitas umum 4) Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah 5) Inventarisasi dan penataan kembali penggunaan areal tanah 6) Pengukuran batas unit pemukiman 7) Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah				
		i. Sarana pemukiman transmigrasi 1) Pembinaan dan pengadiln, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum 2) Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih 3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi 4) Pembinaan dan pembinaan peningkatan saran Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan.				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		<p>3. Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan</p> <p>a. Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penerapan</p>				Kewenangan Pusat
		<p>b. Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan</p> <p>c. Pengerahan</p> <p>1) Pendaftaran dan seleksi calon transmigran</p> <p>2) Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran</p> <p>3) Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan</p> <p>d. Pemberangkatan Transmigran</p> <p>1) Pengangkutan Transmigran melalui laut, udara, dan darat</p> <p>2) Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan</p> <p>3) Pelaksanaan urusan pemberangkatan</p> <p>4) Pengawasan perjalanan transmigran</p> <p>5) Pengaturan rute pemberangkatan</p> <p>6) Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		e. Penempatan Transmigran 1) Kesiapan lokasi dan daya tampung 2) Pendataan transmigrasi dilokasi yang masih di bina				Kewenangan Pusat
		3) Data transmigran yang meninggalkan lokasi disetiap UPT				Pemda yang dituju
		4) Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		4. Penampungan Transmigrasi (Transito) dan Pelatihan Transmigran a. Pelatihan Transmigran 1) Program Pengajaran dan metode pelatihan 2) Penyusunan silabus dan modul pelatihan				Kewenangan Provinsi
		3) Penyusunan calon peserta / pelatih	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		b. Penampungan transmigran di trasito 1) Pelayanan kesehatan bagi transmigran 2) Pelayanan makanan bagi transmigran 3) Pelayanan pembekalan/ peralatan bagi transmigran				Kewenangan Provinsi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		5. Pembinaan Masyarakat Transmigrasi a. Identifikasi dan penjaga pembinaan 1) Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian 2) Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan 3) Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan				Kewenangan Pusat
		b. Pembinaan Pendidikan 1) Penyediaan / Penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan 2) Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status c. Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat				Kewenangan Pusat
		d. Pembinaan kesehatan 1) Penyediaan sarana kesehatan dan KB 2) Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa 3) Pendistribusian bantuan pangan				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		e. Pembinaan rokhani 1) Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama 2) Bimbingan adaptasi masyarakat 3) Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial f. Pelayanan pos di daerah transmigrasi g. Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan h. Penilaian transmigran teladan i. Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha				Kewenangan Pusat/Daerah Penempatan
	476	KELUARGA BERENCANA 1. Alat Kontrasepsi 2. Pelayanan KB a. KB Lestari b. KB Mandiri c. KB Pemerintah 3. Penyuluh Lapangan KB (PLKB) (orientasi/pelatihan Tri Bina, UPPKS, PIK R (Pusat Informasi dan konseling), dll)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	477	Catatan Sipil	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	478	Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1. Pusat Informasi dan konseling Remaja (PIK- R) 2. Sosialisasi (Triad Kesehatan Reproduksi Remaja /KRR, Nikah Dini, Nafsa, Pranikah) 3. Pertemuan Kelompok PIK R 4. Pendidik Sebaya (PS) 5. Konselor Sebaya (KS) 6. Forgen (Forum Genre) 7. Pembinaan Saka Kencana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	479	Keluarga Sejahtera 1. Pemberdayaan Perempuan a. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan (P3P) b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis gender (P2MBG) c. Gerakan sayang ibu dan Bayi (GSIB) d. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) 2. Perlindungan anak	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		a. Penanganan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak (KDRT)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		b. Pemberdayaan Forum Anak menuju Kota Layak Anak (KLA)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		c. Fasilitasi Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGNOTA)				Kewenangan Pusat
		3. Bina Keluarga a. Balita b. Remaja c. Lansia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
32	480	MEDIA MASSA 1. Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bidang media massa 2. Ijin Reklame	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	481	1. Penerbitan / Media Cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran a. Masukan Analisis Bupati				
		1) Materi Rapat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2) Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3) Notulen Rapat Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4) Peliputan terhadap Kegiatan Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
					kinerja Perangkat Daerah	
		2. Liputan Media Massa a. Liputan Rutin b. Liputan Khusus 1) Arus lebaran 2) Pemberangkatan dan Kepulangan Haji c. Liputan Berita Daerah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		3. Laporan dan hasil pemberitaan a. Surat Kabar b. Majalah c. Grafika d. Kliping	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	483	Reklame / Periklanan 1. Ketentuan pemasangan reklame 2. Penerbitan 3. Pameran (non komersial) 4. Pengajuan pembuatan baliho	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	484	Kewartawanan / Jurnalistik				
		1. Pembentukan organisasi profesi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		2. Kasus-kasus kewartawanan (penghinaan, pemukulan, penganiayaan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Bantuan kepada / dari organisasi profesi wartawan 5. Musyawarah wartawan Indonesia 6. Pendidikan jurnalistik khusus wartawan 7. Temu pers / konferensi pers 8. Pers tour 9. Wawancara / audiensi wartawan 10. Kunjungan wartawan asing 11. Kerjasama dengan media massa / media elektronik	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	485	Penerangan / Penyuluhan Masyarakat 1. Publikasi 2. Pendirian Information Center	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	486	Pembinaan Bidang Infokom 1. Training Fotografi 2. Training Berita Jurnalistik 3. Bintek Infokom 4. Rakorda Infokom 5. Rakor pengendalian kegiatan 6. Photograph competition	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	487	Hubungan antar lembaga 1. Organisasi kemasyarakatan / non Pemerintah a. Wahana komunikasi masyarakat b. Bintek pengurus lembaga komunikasi masyarakat c. Bahan informasi cetak lembaga komunikasi masyarakat d. Fasilitas peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		e. Pembekalan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) f. Lembaga komunikasi masyarakat				
		2. Lembaga pemerintah a. Forum Informasi dan kehumasan b. Pertemuan bakohumas dan kehumasan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		c. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) d. d. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		3. Luar Negeri a. Promosi Luar Negeri b. Kunjungan wartawan asing	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	488	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Informasi 1. Pembutaan foto blow up side 2. Tayangan udara tentang kebijakan dan hasil pembangunan 3. Pelayanan informasi melalui feature 4. Pelayanan informasi melalui spot a. Televisi b. Radio 5. Pelayanan informasi melalui media tradisional a. Kesenian rakyat 6. Dialog interaktif a. Bupati menyapa b. Diskusi interaktif satu jam bersama Bupati	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		7. Keterbukaan Informasi Public (KIP) 8. Pejabat pengelola Informasi Daerah				
	489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Bupati 1. Himpunan Naskah Sambutan 2. Klasifikasi Naskah Sambutan 3. Himpunan Dialog Interaktif 4. Himpunan Naskah Rubrik dan Keynote Speaker 5. Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
33	490	FORUM KOMUNIKASI INFORMASI KEHUMASAN (FKIK)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	491	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE) 1. Pendukung (IT) sistem pemerintahan dalam kebijakan, tata kelola dan layanan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
34	500	PEREKONOMIAN 1. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2. KADIN a. HIMKI b. ASEPFI c. APKJ d. ASEPA 3. HISWANA MIGAS (Himpunan Pengusaha Swaswa Migas)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	501	Pengadaan Pangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	502	Pengadaan Sandang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	503	Perizinan pada umumnya, untuk perizinan sesuai bidang klasifikasi pada masalahnya				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Izin perdagangan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Validasi 3. Izin-izin lainnya : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Trayek b. Izin bidang Kesehatan (Optikal; Pelayanan Radiologi Diagnostik dan Dialisis) c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) d. Izin Usaha Pariwisata e. Izin Usaha Peternakan rakyat f. Izin Usaha Perikanan. g. Izin Usaha pemotongan Ternak/hewan h. Izin Pemasangan Reklame i. Izin Usaha Toko Obat Hewan. j. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) k. Izin Usaha Pemotongan Ternak l. Izin Usaha penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras (mesin) 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		m. Izin fasilitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan penunjang kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
	506	Cek Lokasi Berita Acara Cek/ Verifikasi lokasi/ lapangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
35	510	PERDAGANGAN Klasifikasi di sini : Tata Niaga 1. Promosi perdagangan a. Pekan Raya b. Iklan c. Pameran d. Event-event e. Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan) f. Pasar 1. Pengaturan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar 2. Penyuluhan pedagang pasar 3. Pengaturan penempatan los/kios bagi pedagang pasar 4. Surat Ijin Menggunakan Kios/ Los (SIM K/L) 5. Operasi Pasar	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		g. Pertokoan, kios, PKL 1. Pengaturan keamanan, ketertiban dan kebersihan Pertokoan, kios, PKL 2. Penyuluhan pedagang Pertokoan, kios, PKL 3. Pengaturan penempatan bagi pedagang Pertokoan, kios, PKL 4. 4. Surat Ijin Menggunakan Tempat Jualan (SIM TJ)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Pelelangan, distribusi a. Pemasaran Sembako b. Pemasaran hasil industri c. Penentuan harga pokok	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		3. Bina Usaha dan Sarana Perdagangan a. Rencana dan Program kerja b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi c. Pelaksanaan Teknis d. Pemantauan e. Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		4. Tera a. Tera Ulang b. Takaran c. Timbangan dan anak timbangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		5. Kemetrologian				
		a. Standart Tingkat Tiga b. Standart Kerja Ukuran Satuan c. Ukuran Metrologi 1. Peralatan 2. Laboratorium Metrologi Legal 3. Tanki Ukur Mobil 4. Meter Taksi 5. KWH Meter, termasuk di dalamnya listrik dan PDAM 6. SPBU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		d. SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		6. Pembinaan konsumen	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	511	Pemasaran 1. Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll 6. Pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya 2. Pasar 3. Pertokoan, kaki lima, kios 4. Pusat perbelanjaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	512	Ekspor 1. Pengembangan pasar luar negeri 2. Management Perdagangan Internasional 3. Ekspor Hasil Industri a. Kebijakan b. Pemasaran 4. Pemberitahuan Ekspor Barang a. Data jenis komoditi barang ekspor 5. Perdagangan Luar Negeri 6. Promosi Ekspor a. Pembinaan dan pengembangan b. Pelayanan informasi ekspor	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	513	Impor 1. Standart Mata Dagang Impor 2. Management Perdagangan Internasional 3. Kegiatan Impor a. Pembinaan Impor b. Pengendalian Impor 4. Pengawasan Mutu Barang Impor 5. Penyaluran Kegiatan Impor a. Bahan Konsumsi b. Bahan Penolong 6. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	514	Perdagangan Antar Pulau 1. Kerjasama Bahan Baku	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	7	8	
		2. Industri Pemasaran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait	
		3. Kontrak	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait	
	515	Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri 1. Promosi dan Informasi 2. Pameran 3. Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait	
	517	Aneka usaha perdagangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait	
	518	Koperasi					
		1. Bina Usaha Koperasi a. Koperasi Pertanian dan Perkebunan 1. Koperasi pertanian tanaman pangan 2. Koperasi perkebunan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait	
		b. Koperasi perikanan dan peternakan 1. Koperasi perikanan 2. Koperasi peternakan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		c. Permodalan Koperasi 1. Pemupukan Modal 2. Pemanfaatan Modal 3. Perbankan dan Asuransi 4. Permodalan Luar Koperasi 5. Kredit Program Umum 6. Kredit Program Khusus	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		d. Distribusi dan Jasa Koperasi 1. Distribusi Bahan Pokok 2. Distribusi Aneka Bahan 3. Distribusi Kerjasama Niaga 4. Jasa Angkutan 5. Jasa Perumahan 6. Aneka Jasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		e. Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi 1. Koperasi kelistrikan 2. Koperasi Industri 3. Koperasi Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		2. Bina Lembaga Koperasi				
		a. Organisasi Koperasi 1. Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi 2. Pemberian Badan Hukum Koperasi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		3. Penyelesaian Pembubaran Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Perangkaan/ Keragaan Koperasi 5. Pengakuan Koperasi Sekolah	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		6. Amalgamasi (klarifikasi)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		7. Tertib Organisasi Koperasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		8. Penyelesaian Penyelesaian/ Persengkataan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		9. Bimbingan Kesadaran Hukum	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		b. Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi 1. Rapat Anggota Tahunan Koperasi 2. Koperasi dan Badan Pemeriksa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Hubungan dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) 4. Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPPKUD)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		c. Bina Tata Laksana Koperasi 1. Klasifikasi Koperasi Pedesaan 2. Klasifikasi Koperasi Perkotaan 3. Klasifikasi Koperasi Sekunder 4. Klasifikasi KUD Mandiri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		d. Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi 1. Administrasi Koperasi Pedesaan 2. Administrasi Koperasi Perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		3. Karyawan/Manager Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		4. Sumber Daya Manusia 5. Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) 6. Penyaluran Alat Sekolah 7. Bantuan Pemda Kepada Koperasi/ KUD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		e. Akuntansi 1. Akuntansi Koperasi Pedesaan 2. Akuntansi Koperasi Perkotaan 3. Akuntansi Koperasi Sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		f. Pengawasan Koperasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Koperasi Primer 2. Pengawasan Koperasi Sekunder 3. Koperasi Jasa Audit 4. Kerjasama Kantor Akuntan 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		g. Penyuluhan Koperasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kader Koperasi 2. Masyarakat Umum 3. Forum Komunikasi 4. Kelompok Tani 5. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 6. Penilaian Tingkat Nasional 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)				
		a. Pembinaan Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Usaha Mikro 2. Pembinaan Usaha Kecil 3. Pembinaan Usaha Menengah 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		b. Kredit Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit usaha kecil 2. Kredit usaha menengah 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		c. Pengawasan Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Usaha Mikro 2. Pengawasan Usaha Kecil 3. Pengawasan Usaha Menengah 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
36	520	PERTANIAN				
	521	<p>Tanaman Pangan</p> <p>1. Rencana dan Program</p> <p>a. Kebijakan bidang ketersediaan dan distribusi pangan</p> <p>b. Bina Ketahanan Pangan</p> <p>c. Pelaporan Dan Evaluasi Pertanian</p> <p>d. Bimas/Inmas Termasuk Kredit</p>	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		<p>2. Peningkatan Produksi Tanaman Strategi Pangan</p> <p>a. Padi</p> <p>1. Sawah</p> <p>2. Gogo</p> <p>3. Huma</p> <p>b. Palawijo</p> <p>1. Kacang</p> <p>2. Jagung</p> <p>3. Ketela Pohon</p> <p>4. Ubi-ubian</p> <p>5. Kedelai</p> <p>c. Holtikultura</p> <p>d. Sayuran</p> <p>e. Buah-buahan</p> <p>f. Tanaman hias</p> <p>g. Perlebahan</p> <p>h. Panen Gagal (Puso)</p>	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Sarana Usaha Pertanian a. Kebijakan teknis bidang sarana pertanian b. Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) c. Pembenihan dan Pembibitan d. Pupuk e. Irigasi Pertanian f. Rehabilitasi Lahan Pertanian	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		4. Perlindungan Tanaman a. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan 1. Penyakit Tanaman Pangan (daun dan batang) b. Hama tanaman pangan 1. Hama Serangga, diklasifikasikan : wereng, walang sangit, tungro 2. Hama tikus dan sejenisnya c. Pemberantasan d. Pestisida 1. Agensi Pengendalian Hayati e. Bencana alam f. Kebakaran	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		5. Tanah Pertanian Pangan a. Persawahan b. Perladangan c. Kebun/Pembibitan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		6. Pengusaha, Petani	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		7. Lahan Kritis/ KTA				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		8. Pemasaran dan Promosi Pertanian a. Pemasaran tanaman pangan b. Pemasaran hortikultura	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		9. Pengembangan Sumber Daya Pertanian a. Pengembangan sumber daya pertanian b. Balai benih pertanian	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	523	Perikanan dan Kelautan				
		1. Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan a. Penyuluhan b. Teknologi dan pengembangan perikanan (budidaya ikan, tangkap) c. Pengembangan kawasan budidaya perikanan d. Rehabilitasi kawasan budidaya perikanan e. Informasi perikanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Produksi Perikanan a. Pelelangan b. Standarisasi Mutu Hasil Perikanan c. Perikanan Budidaya : CBIB, CPIB, CPPIB d. Sertifikasi Kesehatan Ikan e. Surat keterangan Asal Ikan (SKA)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Usaha Perikanan a. Pelatihan/Penyuluhan Nelayan b. Pembinaan wanita nelayan c. Perbenihan / pembibitan d. Pengelolaan air e. Pemberdayaan kelembagaan nelayan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		4. Pemasaran dan Pengolahan hasil perikanan a. Ekpor Komoditas Hasil Perikanan b. Impor Hasil Perikanan c. Pemasaran Dalam Negeri d. Pengusaha Perikanan e. Promosi Komoditas Unggulan f. Kemitraan usaha g. Bantuan Nelayan h. Pengembangan pengolahan hasil perikanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		5. Sarana / Prasarana Perikanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		a. Pelabuhan Perikanan Pantai				Kewenangan Provinsi
		b. TPI/PPI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		c. Kesyahbandaran				Kewenangan Provinsi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		d. Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, <i>pump</i> , <i>Cold Storage</i> , tempat es dsb e. Lahan budidaya ikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		6. Pengendalian hama dan penyakit a. Penyakit Ikan b. Hama Ikan c. Obat – obatan termasuk sertifikasinya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	524	Peternakan dan Kesehatan Hewan				
		1. Produksi a. Pembibitan b. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan c. Budidaya	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) a. Pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT) 3.	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		3. Sarana Usaha Peternakan a. Pelayanan Usaha b. Pengolahan Hasil dan Pemasaran c. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Kesehatan Hewan a. Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan c. Obat – obatan Hewan d. Pelayanan Kesehatan Hewan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		5. Kesehatan Masyarakat Veteriner a. Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan b. Produk Hewan c. Higienis dan Sanitasi d. Sertifikasi	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		6. Pelayanan Usaha dan Pemasaran a. Promosi produksi peternakan b. Pemasaran peternakan 1. Pemasaran produksi peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		c. Ijin usaha peternakan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		7. Pengawasan dan standarisasi a. Rumah potong hewan b. Laboratorium c. Standarisasi bibit ternak d. Pakan e. Hijauan Pakan Ternak (HPT) f. Obat hewan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		g. Izin/rekomendasi bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		8. Pengembangan peternakan a. Inseminasi buatan b. Pembibitan c. Kawasan peternakan d. Penyebaran ternak	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		9. Organisasi peternakan a. Asosiasi peternakan b. Kelompok tani ternak	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		10. Laporan Bidang Peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	525	PERKEBUNAN				
		1. Kebijakan bidang pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Rencana, Program dan Pelaporan a. Pelaporan b. Monitoring c. Statistik Perkebunan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Produksi perkebunan a. Karet b. Teh c. Tembakau d. Tebu e. Cengkeh f. Kelapa/Kopra/Kelapa Sawit g. Kopi h. Kakao i. Jenis Tanaman yang lain	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		4. Usaha Perkebunan a. Benih b. Pembibitan c. Kelompok Tani d. Kemitraan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		e. Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		f. Pemasaran Hasil Perkebunan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		5. Perlindungan Tanaman a. Hama, Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) b. Pestisida c. Pupuk	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		d. Agensia Pengendalian Hayati e. Bencana alam f. Dampak Perubahan Iklim (DPI) g. Kebakaran	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	7	8	
		6. Alat dan Mesin Perkebunan a. Power Sprayer b. Hand Sprayer c. Polibag d. Alat Laboratorium Perkebunan e. Reagen f. Sarana / Alat Produksi Perkebunan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait	
		7. Pengolahan Lahan a. Terasering	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait	
		8. Pemasarakatan a. Penyuluhan b. Sosialisasi c. Informasi	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait	
	526	Ketahanan Pangan					
			1. Program Bimbingan Masal	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
			2. Pengembangan Sarana Sumber Daya a. Pembinaan Teknologi b. Sarana Produksi dan Permodalan c. Kelembagaan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
			3. Agrobisnis a. Mutu Hasil b. Pengelolaan Hasil Pangan c. Pemasaran Hasil d. Kemitraan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Distribusi Pangan a. Sistem dan Pola Distribusi b. Sarana dan Prasarana Distribusi c. Pengadaan dan Cadangan Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		5. Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan a. Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan b. Pola Konsumsi Pangan Masyarakat c. Sistem Informasi Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		6. Laporan Bidang Ketahanan Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	527	Penyuluhan				
		1. Sumber Daya Manusia a. Penyuluh b. Pelaku utama pelaku usaha c. Stake Holder	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Kelembagaan a. Struktural b. Non Struktural c. Pelaku Utama Pelaku Usaha d. Lembaga Profesi	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		e. Sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Penyelenggaraan Penyuluhan a. Program b. Metode c. Promosi/ Pameran/ Kampanye d. Penghargaan/Lomba e. Materi	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	528	Tata Guna Lahan dan Air a. Kebijakan dan program tata guna lahan dan air b. Pembangunan sarana dan prasarana irigasi pertanian c. Pembangunan Jalan Usaha Pertanian & Perkebunan	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	529	Informasi Pertanian a. Informasi tanaman pangan b. Informasi perkebunan c. Informasi peternakan d. Informasi hortikultura	Biasa/terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
37	530	PERINDUSTRIAN				
		1. Bimbingan teknis, peningkatan mutu, hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Kerjasama di bidang industri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		3. Pengembangan sarana usaha dan produksi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	531	Industri Logam	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	532	Industri Mesin/ Elektronik/ Energi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	533	Industri Kimia/Farmasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	534	Industri Tekstil	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	535	Industri Makanan/Minuman/Agro	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	536	Aneka Industri/Perusahaan 1. Home Industri/Aneka Kerajinan a. Kerajinan Rakyat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	537	Industri Kayu/Meubel/Hasil Hutan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	539	Badan Usaha Milik Daerah				
		1. Pembentukan 2. Penggabungan 3. Pembubaran 4. Perusahaan Daerah (Perusda, PDAM)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		a. Program Kerja dan Anggaran b. Penyertaan Modal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		c. Urusan Kepegawaian	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		d. Pembagian Laba/ Deviden e. Laporan Bulanan f. Laporan Tahunan g. Perencanaan dan Pemeliharaan Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		h. Produksi dan Distribusi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		i. Baca Meter j. Jasa Keuangan Non Bank	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		5. Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
38	540	PERTAMBANGAN/KELAUTAN				Kewenangan Pusat
	541	Minyak dan Gas Bumi 1. Kontrak Kerja 2. Pengolahan 3. Penyaluran 4. Tangki , Pompa , Tanker				Kewenangan Pusat
	542	Gas Bumi				Kewenangan Pusat
	543	Logam mulia meliputi : intan, emas, perak				Kewenangan Pusat
	544	Logam 1. Timah 2. Alumunium, boxit 3. Besi, termasuk besi tua 4. Tembaga				Kewenangan Pusat
	545	Energi 1. Energi alternatif a. Gas Rawa b. Bahan Bakar Nabati (Biofuel) c. Biogas d. Energi baru terbarukan e. Perijinan f. Rekomendasi g. Pembinaan dan Pengawasan 2. Konservasi Energi 3. Pemetaan Energi				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)				
	546	Pertambangan, mineral dan batubara 1. Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) a. WIUP Batuan b. WIUP Bukan Logam c. WIUP Logam d. WIUP Batubara 2. Rekomendasi Teknis 3. Perijinan a. IUP Eksplorasi b. IUP Operasi Produksi c. IUP Operasi Produksi Khusus d. Ijin Usaha Jasa Pertambangan e. Pencabutan Ijin 4. Pembinaan 5. Pengawasan a. Pengawasan Usaha Pertambangan b. Penerbitan Kegiatan Pertambangan 6. Pasca Tambang a. Reklamasi b. Penutupan 7. Air Tanah a. Cekungan Air Tanah (CAT) b. Pemetaan CAT c. Imbuhan CAT d. Lepas CAT e. Konservasi f. Pengendalian Daya Rusak 8. Rekomendasi Teknis a. Sumur Artesis b. Sumur Bor c. Sumur Gali (Pasak) d. Pengusaha Pengebor (APATINDO)				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		e. Sumur Pantau f. Harga Dasar Air / Nilai Perolehan Air g. Hidrologi				
	547	Geologi 1. Pemetaan 2. Mitigasi Bencana Geologi 3. Vulkanologi a. Pengawasan Vulkanologi b. Panas Bumi 4. Hidrogeologi 5. Sumber daya mineral 6. Gerakan tanah (longsor, amblesan) 7. Pengawasan, pengendalian				Kewenangan Pusat
	548	Kesamudraan				Kewenangan Pusat
	549	Penghematan Energi				Kewenangan Pusat
39	550	PERHUBUNGAN	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	551	Perhubungan Darat 1. Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau a. Keamanan lalu lintas, Rambu-rambu	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		1) (Rambu Lalu lintas, APILL, RPPJ, Warning Light, Marka, Penerangan Jalan dan Prasarana/Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya)				
		b. Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur) 1) Numpang Uji Kendaraan Bermotor 2) Mutasi Uji Kendaraan Bermotor Keluar	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3) Laporan Data Kendaraan Uji 4) Hasil Uji Kendaraan Bermotor 5) Berita Acara Hasil Uji c. Kecelakaan Lalu Lintas d. Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas, Andalalin, CFD)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Angkutan Jalan Raya a. Rekomendasi (trayek, usaha angkutan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		b. Terminal 1) Sarana dan Prasarana terminal 2) Evaluasi dan pelaporan terminal 3) Surat Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4) Surat Teguran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5) Surat Peringatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		c. Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		d. Jembatan Timbang/Lebih Muatan e. Uji Mutu (kendaraan baru, berkala) f. Rekom Balik Nama dan Rubah Status g. Rekom Kendaraan Umum Box h. Realisasi Perusahaan Angkutan Baru	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Perparkiran a. Pengelolaan perparkiran b. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas perparkiran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Feri a. Sarana dan Prasarana/Kapal	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pelabuhan c. Trayek d. Angkutan penumpang, angkutan barang e. Keselamatan f. Kecelakaan g. Perawatan/perbaikan h. Perijinan 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	552	Perhubungan Laut				
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> a. Rambu-rambu/Mercu Suar b. Kelaikan Kapal/ Pembangunan Kapal c. Fasilitas Keselamatan/Keamanan d. Telekomunikasi Pelayaran e. Sertifikasi Kesempurnaan Kapal 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> f. Sertifikasi Awak Kapal 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Kecelakaan, Gangguan <ul style="list-style-type: none"> a. Kecelakaan Penumpang/Kapal b. Kecelakaan Barang c. Gangguan Sarana/Prasarana d. Pembajakan/ Penyelundupan e. Pencemaran 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Perijinan a. Ijin Berlayar b. Ijin Pekerjaan Bawah Air c. Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal d. Ijin Pembukaan Kantor Cabang e. Ijin Usaha Angkutan Laut f. Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut g. Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan h. Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus i. Ijin Pembangunan Dermaga Khusus	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	556	Pariwisata dan Rekreasi 1. Usaha Pariwisata a. Usaha Jasa Pariwisata 1. Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata 2. Restoran dan Rumah Makan b. Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		c. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata 1. Sea World d. Usaha Sarana Pariwisata 1. Ijin Pariwisata 2. Ijin Usaha Pariwisata 3. Ijin Usaha Jasa Pariwisata 4. Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata 5. Ijin Usaha Sarana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		e. Wisatawan 1. Wisatawan Nusantara 2. Wisatawan Mancanegara f. Promosi dan Informasi Pariwisata 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		2. Perhotelan a. Status Hotel b. Kelas Hotel c. Tarif	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		3. Travel Service a. Pramu Wisata b. Biro Perjalanan/Angkutan Wisata c. Souvenir d. Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		4. Tempat Rekreasi/Wisata a. Obyek dan Daya Tarik Wisata 1. Wisata Alam (Laut, Gunung, Air Terjun) 2. Taman Hiburan 3. Wisata Kuliner b. Rehabilitasi/Perawatan c. Pengembangan Fasilitas d. Tanah/Bangunan e. Bina Usaha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		f. Institusi 1. Asosisasi 2. Lembaga Kepariwisata	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		5. Kerjasama Kepariwisataaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
		6. Bimbingan Teknis / Pelatihan Kepariwisataaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
40	560	TENAGA KERJA				
		1. Permintaan Data PMI Luar Negeri a. Data Persediaan PMI Dari Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		2. Job Order PMI Ke Luar Negeri Oleh P3MI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		3. Rekrutmen Calon PMI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		4. Seleksi Naker Ke Luar Negeri a. Pendaftaran dan Seleksi Calon PMI b. Berkas Persyaratan PMI c. Pemeriksaan Dan Hasil Cek Kesehatan PMI	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian/Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		5. Persyaratan Naker PMI a. Permohonan Rekomendasi Paspor b. Perjanjian Kerja PMI c. Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KIPMI) d. Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri e. Pelatihan PMI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		6. Pemberangkatan Naker a. Pembekalan Akhir Pemberangkatan PMI Ke Luar Negeri b. Pemberangkatan Ke Luar Negeri c. Berita Acara Serah Terima PMI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		7. Pemulangan Naker a. Kepulangan PMI karena kontraknya habis b. Pemulangan PMI Ilegal c. PMI Terkena Kasus Pidana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
	561	Pengupahan 1. Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional 2. Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten /Kota dan Propinsi 3. Kebutuhan Fisik Minimum 4. Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur) 5. Laporan Data Remittance 6. Pembayaran Gaji/Upah PMI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	562	Penempatan Kerja 1. Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT) a. Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP) b. Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional c. Pengembangan Kesempatan Berusaha /Perluasan Kerja 2. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) 3. Lembaga Penyalur Naker a. Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Daerah b. Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (P3MI/BKS/BKK) c. Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (P3MI /BKS/BKK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
	563	Pendidikan dan Pelatihan				
		1. Pendidikan Pekerja a. Pendidikan dan Latihan Kerja b. Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		c. Diklat Di Luar Negeri (Pemaganagan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		2. Sarana dan Prasarana Latihan Kerja a. Tempat Pelatihan (BLK) b. Instruktur/Pelatihan c. Modul/Silabus dan Bahan Praktek d. Kurikulum dan Metode Pengajaran e. Sertifikat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		3. Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
	564	Tenaga Sukarela				Kewenangan Pusat
	565	Perselisihan Pekerja 1. Perselisihan dan Perkara Hukum Naker a. Pengaduan Perkara Pekerja/Naker b. Pemeriksaan Perkara Pekerja/Naker c. Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja/Naker	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
		d. Sidang Perkara Perselisihan Pekerja /Naker e. Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja/Naker	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> f. Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D/P4P) g. Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (P4D/P4P) h. Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4D/P4P) 2. Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja		pengawas,serta penegak hukum		
	566	Keselamatan dan Keamanan Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Proteksi Kebakaran 2. Pemakaian Alat Keselamatan Kerja 3. Keterangan Kelayakan Atau Pelindung Diri (APD) Dalam Bekerja 4. Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) 5. Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja 6. Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes 7. Gangguan Lingkungan Tempat Usaha 8. Perlengkapan Sarana Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/angkut) 2. Pemasangan dan Pemakaian pesawat uap (ketel uap) 3. Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel 				Kewenangan Provinsi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Pemasangan dan Pemakaian Tangki Tak Bertekanan 5. Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran 9. Ijin Tenga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (Shift Malam)				
	567	Pemutusan Hubungan Kerja 1. Pengaduan PHK Sepihak 2. PHK Masal 3. Bantuan Hukum Bagi Pekerja yang di PHK 4. Ijin Melakukan PHK 6. Perhitungan Masa Kerja Bagi Pekerja yang di PHK 7. Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang di PHK 8. Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
	568	Kesejahteraan Buruh 1. Bantuan Kredit/Bantuan Modal Kerja Bagi Naker 2. Pemilihan Pekerja Teladan 3. Perumahan Pekerja 4. Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek 5. Koperasi Pekerja 6. Sarana Transportasi Pekerja 7. Perpustakaan Pekerja 8. Tempat Ibadah Pekerja 9. Rekreasi dan Olahraga Pekerja 10. Pendirian, Pendaftaran dan Kegiatan Organisasi Pekerja a. Lembaga Kerjasama Bipartid	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	7	8	
	569	Tenaga Kerja Orang Asing 1. Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)				Kewenangan Pusat	
		2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 3. Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing 4. Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing				Kewenangan Pusat	
		5. Data Tenaga Kerja Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait	
		6. Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing 7. Pemulangan Tenaga Kerja Asing 8. Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing 9. Tenaga Kerja Asing Ilegal				Kewenangan Pusat	
	575	Penanaman Modal/ Investasi :					
		1. Promosi Penanaman Modal meliputi : a. SOP Promosi Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait	
		2. Informasi Penanaman Modal meliputi: a. SOP Informasi Penanaman Modal b. Leaflet	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Fasilitasi penanaman modal kepada perusahaan hasil Central Java Investmen Business Forum (CJIBF) dan investor baru, perluasan Izin Lokasi kepada investor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		4. Kerjasama penanaman modal dalam bentuk penandatanganan kepeminatan investasi investor dengan Bupati BATANG pada Central Java Investmen Business Forum (CJIBF)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		5. Data Perusahaan PMA/PMDN	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		6. Berita Acara pembinaan, pengawasan, pengendalian penanaman modal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		7. Inventarisasi penanganan pengaduan permasalahan perizinan penanaman modal	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait
		8. Berita Acara penanganan pengaduan permasalahan perizinan penanaman modal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
41	580	PERBANKAN MONETER				
		1. Bank Milik Pemerintah a. Pusat/propinsi (BRI, BNI, BANK JATENG, Bank Mandiri) b. Kabupaten/kota (BPR, BKK, BANK PASAR) c. Program Kerja dan Anggaran d. Penyertaan Modal e. Urusan Kepegawaian f. Pembagian Laba/Deviden g. Laporan berkala		Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		h. Laporan Tahunan i. Laporan Pertanggungjawaban j. Rapat Umum Pemegang Saham k. Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Bank Milik Swasta	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Dewan Pengurus BUMD a. Persetujuan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) BUMD b. Pertimbangan dan Persetujuan c. Pertimbangan LPJ BUMD d. Laporan Berkala e. Laporan Tahunan f. Laporan Masa Akhir Jabatan Direksi g. Rapat Umum Pemegang Saham	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	581	Kredit	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	583	Tabungan a. Deposito	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	586	Alat Pembayaran meliputi : Cek, Giro wesel, transfer	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
42	590	AGRARIA				Kewenangan Pusat
	591	Tata Guna Tanah 1. Pemetaan dan Pengukuran 2. Perpetaan 3. Penyediaan Data a. Peta dan Publikasi 4. Fakta Tata guna Tanah 5. Tanah Kritis 6. Riwayat Tanah 7. Letter C				Kewenangan Pusat
	592	Landreform 1. Redistribusi a. Penentuan Tanah Obyek Landreform b. Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		2. Ganti Rugi a. Ganti Rugi Tanah Kelebihan b. Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan c. GantiRugi Tanah Absentee d. Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee e. Ganti Rugi Tanah Partikelir f. Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir				Kewenangan Pusat
	596	Izin Pertanahan : 1. Izin Lokasi 2. Izin Perubahan Tanah Pertanian ke Tanah Non Pertanian 3. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah				Kewenangan Pusat
43	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
	601	Tata Bangunan Konstruksi, Industri Konstruksi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	602	Pra kualifikasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	603	Arsitektur	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	604	Bahan bangunan 1. Tanah dan batu 2. Aspal 3. Besi dan logam lainnya a. Besi beton b. Besi Profil (konstruksi) c. Paku d. Alumunium profil	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu) 5. Semen 6. Kayu 7. Bahan penutup Atap 8. Alat-alat penggantung dan pengunci 9. Bahan-bahan bangunan lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	605	Instalasi 1. Instalasi bangunan 2. Instalasi listrik 3. Instalasi air/sanitasi 4. Instalasi pengatur udara 5. Instalasi akustik 6. Instalasi cahaya/ penerangan 7. Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	606	Konstruksi pencegahan 1. Terhadap kebakaran 2. Terhadap gempa 3. Terhadap angin/udara/panas 4. Terhadap kegaduhan 5. Terhadap gas/explosive 6. Terhadap serangga	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	607	Peralatan pekerjaan umum dan ketenagaan 1. Alat-alat berat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	608	Mobil pemadam kebakaran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	609	Alat Pemadam Kebakaran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
44	610	PENGAIRAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	611	Irigasi 1. Bendungan Waduk a. Bendungan b. Tanggul c. Pelimpahan banjir d. Bangunan pengambilan e. Senderan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Bangunan DAM				
		a. Bendung b. Bendung dengan pintu bilas c. Pengambilan bebas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		d. Kantong lumpur e. Escope chenel	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Bangunan pembawa				
		a. Saluran - Saluran induk - Saluran sekunder - Suplesi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		b. Bangunan - Bangunan bagi - Bangunan dan sadap - Bangunan sadap - Bangunan check - Bangunan terjun c. Bax Tersier d. Got miring e. Talang f. Syphon g. Gorong-gorong h. Pelimpahan samping	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Bangunan Pembuangan a. Saluran - Saluran Pembuang induk - Saluran Pembuang sekunder	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		b. Bangunan - Bangunan out let - Bangunan terjun - Bangunan penahan banjir c. Gorong-gorong pembuangan d. Talang pembuang e. Syphon pembuangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		5. Bangunan lainnya a. Jalan - Jalan Inspeksi b. Jembatan - Jembatan inspeksi - Jembatan Hewan c. Tangga cuci d. Kubangan kerbau e. Waduk lapangan f. Bangunan penunjang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		g. Jaringan telepon PABX	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		h. Bangunan TPI dan pasar ikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	612	Polder 1. Tanggul keliling a. Tanggul b. Jembatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Bangunan pembawa a. Saluran - Saluran muka - Saluran pembawa induk - Saluran pembawa sekunder	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		b. Bangunan bagi - Gorong-gorong - Syphon	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
					kinerja Perangkat Daerah	
		3. Bangunan Pembuangan a. Stasiun pompa pembuangan b. Saluran - Saluran Pembawa Induk - Saluran Pembawa Sekunder c. Pintu Air Pembuangan d. Gorong-gorong pembuangan e. Syphon pembuangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Bangunan Lainnya a. Bangunan - Bangunan Pengukur Air - Bangunan Pengukur Curah Hujan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Rumah Petugas Eksploitasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	614	Pengendalian Sungai				
		1. Bangunan Pengamanan a. Tanggul Banjir b. Pintu Pengatur Banjir c. Klep Pengatur Banjir d. Tembok Pengaman Talut e. K r i b f. Irigasi g. Check Dam h. Syphon	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		2. Saluran pengaman a. Saluran banjir b. Saluran Drainage c. Corepure	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Bangunan lainya a. Stasiun 1. Stasiun pengukur Curah Hujan 2. Stasiun Pengukur Air	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
45	620	JALAN 1. Kriteria Jalan a. Jalan Kabupaten	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	621	Jalan Kabupaten				
		1. Daerah Penguasaan a. Tanah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		b. Bangunan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Bangunan sementara a. Kantor proyek b. Barak Kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Badan Jalan a. Pekerjaan Tanah (earth work) b. Stabilisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Perkerasan a. Lapisan Pondasi bawah b. Lapisan Pondasi c. Lapisan Permukaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Drainage a. Parit Tanah b. Gorong-gorong (culvert)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		6. Buku Trotoir a. Tanah b. Perkerasan c. Pasangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		7. Medium a. Tanah c. Perkerasan d. Pasangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		8. Daerah sampingan a. Tanaman b. Pagar	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		9. Bangunan Pelengkap dan Pengaman a. Rambu-rambu/tanda- tanda lalu lintas b. Lampu Penerangan c. Lampu Pengaturan lalu Lintas d. Patok-patok KM e. Patok-patok R.O.W. (Sempadan) f. Rel Pengamanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		g. Turap Penahan h. Bronjong	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	622	Jalan Luar Kota				
		1. Daerah penguasaan a. Tanah b. Bangunan c. Jembatan sementara d. Barak kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Badan jalan a. Pekerjaan tanah (earth work) b. Stabilisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Perkerasan (pavement) a. Lapis pondasi bawah b. Lapis pondasi c. Lapis permukaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Drainage a. Parit b. Gorong-gorong (culvert) c. Buku trotoir d. Tanah e. Perkerasan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Trotoir a. Tanah b. Perkerasan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		6. Medium				
		a. Tanah b. Perkerasan c. Pasangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		7. Daerah samping	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		8. Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan a. Rambu-rambu b. Lampu penerangan c. Lampu Pengatur lalu lintas d. Patok-patok KM e. Patok-patok R,O,W (sempadan) f. Rel pengamanan g. Turap penahan h. Bronjong	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
46	630	JEMBATAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	631	Jembatan pada jalan kabupaten 1. Daerah penguasaan a. Tanah b. Bangunan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Bangunan sementara a. Jembatan sementara b. Kantor Proyek c. Barak kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		3. Pekerjaan tanah (earth work) a. Galian tanah b. Timbunan tanah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		4. Pondasi a. Pondasi kepala jembatan b. Pondasi pilar c. Pondasi angker	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Bangunan bawah a. Kepala jembatan b. Pilar c. Pilon c. Landasan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		6. Bangunan a. Gelagar b. Lantai c. Perkerasan d. Jalan orang/trotoar e. Sandaran f. Talang air	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		7. Bangunan pengaman a. Turap/penahan b. Bronjong c. Strek Dam d. Kist Dam e. Coupute f. Krip	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		8. Bangunan pelengkap a. Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas a. Patok pengamanan b. Patok R.O.W. (sempadan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		9. Oprit a. Badan b. Perkerasan c. Drainage d. Baku e. Medium	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	632	Jembatan pada jalan luar kota				
		1. Daerah penguasaan a. Tanah b. Bangunan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		2. Bangunan sementara a. Jembatan sementara b. Kantor Proyek c. Barak kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		3. Pekerjaan tanah (earth work) a. Galian tanah b. Timbunan tanah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Bangunan Bawah a. Kepala Jembatan b. Pilar c. Pilon d. Landasan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		6. Bangunan Atas a. Gelagar b. Lantai c. Perkerasan d. Jalan orang/trotoir e. Sandaran f. Talang air	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		7. Bangunan pengaman a. Turap/penahan b. Bronjong c. Strek Dam d. Kist Dam e. Coupute f. Krib	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		8. Bangunan pelengkap a. Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		a. Patok pengamanan b. Patok R.O.W. (sempadan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
		9. Oprit a. Badan b. Perkerasan c. Drainage d. Baku e. Medium	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
47	640	BANGUNAN (Perijinan (IMB, dll)) a. Rekomendasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	641	Bangunan Pemerintah 1. Gedung DPRD 2. Gedung Setda 3. Perkantoran 4. Pendopo	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	642	Bangunan Pendidikan 1. Taman Kanak-Kanak 2. SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	643	Bangunan Rekreasi 1. Bangunan Olahraga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	644	Bangunan Perdagangan 1. Pusat Perbelanjaan 2. Gedung Perdagangan (SCJ, Showroom, BATANG Trade and Tourism Center/JTTC) 3. Bank (Bank Milik Pemerintah Daerah) 4. Perkantoran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	645	Bangunan Pelayanan Umum 1. Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum 2. Rumah Sakit 3. Terminal Angkutan Darat 4. Bangunan Keagamaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	646	Bangunan Peninggalan Sejarah 1. Monumen, Tugu 2. Benteng Portugis 3. Klenteng 4. Rumah Adat Tradisional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	648	Bangunan Tempat Tinggal 1. Rumah Perkotaan 2. Inti/ Sederhana 3. Sedang/ Mewah 4. Rumah Pedesaan 5. Rumah Contoh 6. Real Estate 7. Rumah Layak Huni 8. Rumah Tidak Layak Huni 9. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 10. Rumah Khusus 11. Rumah Relokasi korban bencana 12. Rumah berbasis komunitas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		10. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan a. Utilitas jaringan listrik b. Utilitas jaringan air bersih c. Utilitas jaringan air kotor d. Ruang Terbuka Hijau /RTH e. Jalan & Jembatan f. Drainase/saluran g. Tempat Ibadah h. Gedung pertemuan i. Pagar lingkungan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> j. Lapangan Olah Raga k. IPAL l. Sarana Permakaman m. Fasilitas umum lainnya 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		11. Rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan b. Rekomendasi penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) c. Rekomendasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun) d. Pengesahan Site Plan Perumahan 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> e. Rekomendasi izin lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA)/Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		12. Permakaman <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana permakaman <ul style="list-style-type: none"> 1. Mobil Jenazah permakaman 2. Lahan Permakaman b. Penataan permakaman c. Sosialisasi permakaman d. Bintek permakaman 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	649	Elemen Bangunan 1. Pondasi a. Diatas tiang 2. Dinding a. Penahan beban b. Tidak menahan beban 3. Atap 4. Lantai/langit-langit a. Suspendend b. Solit 5. Pintu/jendela a. Pintu hermonik b. Pintu biasa c. Pintu sorong d. Jendela kayu e. Jendela sorong f. Jendela vertikal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
48	650	TATA RUANG KOTA	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	651	Daerah perdagangan/pelabuhan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	653	Daerah Perumahan (site & servei)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	654	Daerah Industri 1. Industri Rumah (home industri)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	655	Daerah Rekreasi (open space)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	658	Kesehatan Lingkungan 1. Persampahan a. Bangunan pengumpulan b. Bangunan Pemusnahan c. Inovasi pengelolaan sampah d. Bank Sampah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
		2. Kualitas Udara 3. Air Limbah 4. Kebisingan 5. Kebersihan kota	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
	659	Tempat Pembuangan akhir sampah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
49	660	TATA LINGKUNGAN 1. Lingkungan Hidup 2. Kebersihan Lingkungan 3. Pencemaran Lingkungan a. Pencemaran Air b. Pencemaran Udara c. Pencemaran Tanah 4. Pertamanan 5. Penghargaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	661	Kerusakan Lingkungan 1. Konservasi Pesisir Dan Laut 2. Konservasi Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
	662	Pentaatan Hukum Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
	663	Laboratorium Lingkungan 1. Air 2. Udara 3. Tanah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
	664	Pengembangan Teknologi Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
	665	Pengembangan Kapasitas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
	666	Limbah 1. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) 2. Limbah cair 3. Limbah Padat 4. Limbah Gas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	667	Kajian Lingkungan Hidup 1. Analisa Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) a. Komisi Penilaian AMDAL (Pusat/Daerah) b. Tes/Uji Laboratorium Lingkungan Hidup 2. Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) 3. SPPL : Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
	668	Audit Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
	669	Program-program Lingkungan Hidup 1. Program Kali Bersih 2. Program Langit Biru 3. Program Bersih Pantai 4. Program Adiwiyata 5. Program Kampung Organik 6. Program Kampung Iklim	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
50	690	AIR MINUM				
	691	Intako 1. Broncaptering 2. Sumur a. Sumur Dalam 3. Bendungan 4. Perpompaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	692	Transmisi air baku 1. Perpipaan 2. Katup udara(air relatif) 3. Katup pelepasan(blow off) 4. Bak pelepasan tenaga 5. Jembatan pipa 6. Syphon	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	693	Instalasi pengelolaan 1. Penampungan akhir/Reservoir	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	694	Distribusi 1. Reversior menara air /Reservoir a. Menara b. Reversior dibawah 2. Perpipaan 3. Perpompaan 4. Jembatan Pipa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
		5. Syphon 6. Hydran a. Hydran umum b. Hydran kebakaran 7. Katup / Valve a. Katup udara (air relatif) b. Katup pelepasan (blow off) 8. Bak pelepasan tenaga (pressure reducing valve)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	695	Promosi pemasangan 1. Pemasangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	696	Data pelanggan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	697	Pengaduan/ keluhan pelanggan 1. Tindak lanjut	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
51	700	PENGAWASAN				
		1. Kebijakan Teknis Pengawasan	Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
		2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
		3. Kasus	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
		4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	701	Pengawasan urusan dalam meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	702	Pengawasan Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	703	Pengawasan Kekayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	704	Pengawasan Perpustakaan dan dokumen / arsip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	705	Pengawasan Perencanaan pengadaan / proyek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	707	Pengawasan Penelitian/Riset	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	708	Pengawasan Konferensi/Rapat Dinas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	709	Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat / PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
52	710	BIDANG PEMERINTAHAN				
	713	Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	714	Pengawasan Pemerintahan Desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	718	Pengawasan Hukum/Konstitusi/Peraturan Lainnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	720	BIDANG POLITIK				
	721	Pengawasan Partai 1. Pelanggaran pemasangan atribut partai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang / Bagian Instansi terkait
	722	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan / Agama / Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	723	Pengawasan Organisasi Profesi dan fungsional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian / Bidang Instansi terkait
	724	Pengawasan organisasi kepemudaan / olah raga	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian / Bidang Instansi terkait
	725	Pengawasan Buruh, Tani, Nelayan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian / Bidang Instansi terkait
	726	Pengawasan Organisasi Wanita	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	727	Pengawasan Pemilu 1. Pemilu legislatif dan DPD 2. Pemilu Eksekutif / Presiden / Gubernur / Bupati 3. Kalender Pengawasan Tingkat Kabupaten / kota 4. Jurnal Pengawasan Tingkat Kabupaten / Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	728	Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Partai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	729	Pengawasan Pendanaan Partai	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
54	730	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN				
	734	Pengawasan Perlindungan Masyarakat	Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	735	Pengawasan Penyimpangan Pejabat / PNS 1. Persengketaan PNS 2. Pembunuhan 3. Penganiayaan/Perampokan / Pencurian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
		4. Pemalsuan 5. Tindakan Asusila / Pelecehan Seksual 6. Korupsi / Penyalahgunaan Jabatan Struktural	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	736	Pengawasan Bencana Alam	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	737	Pengawasan SAR / Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	738	Pengawasan Keamanan Aparat / Pejabat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	739	Pengawasan Lingkungan Hidup	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang/ Bagian Instansi terkait
55	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	741	Pengawasan Pembangunan Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan 1. Kesejahteraan guru 2. Fasilitas / Sarana 4. Mutu Pendidikan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	743	Pengawasan Kebudayaan 1. Kebudayaan Daerah/Nasional 2. Kebudayaan Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	744	Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	745	Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	747	Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	748	Pengawasan Kehumasan, Media Massa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	749	Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
56	750	BIDANG PEREKONOMIAN				
	751	Pengawasan Perdagangan dan Pendistribusian 1. Pengawasan barang beredar termasuk barang bersubsidi, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), barang berstandar SNI a. Pupuk b. BBM c. LPG d. Lain-lain 2. Pengawasan dan pembinaan pergudangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	752	Pengawasan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan				
		a. Pengawasan pertanian b. Pengawasan peternakan c. Pengawasan perkebunan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	753	Pengawasan Perindustrian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	755	Pengawasan Perhubungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	756	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang instansi terkait
	757	Pengawasan PMDN/PMA	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	758	Pengawasan Perbankan / Moneter	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
57	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	761	Pengawasan Pengairan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	762	Pengawasan Jalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	763	Pengawasan Jembatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	764	Pengawasan Bangunan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait
	765	Pengawasan Tata Ruang Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/ Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	766	Pengawasan Tata Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	767	Pengawasan Ketenagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	768	Pengawasan Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi terkait
	769	Pengawasan air minum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
58	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	771	Pemilihan Bupati, Wakil Bupati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	772	Serah Terima Jabatan Publik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	775	Laporan Pertanggungjawaban Bupati 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 3. Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	776	Penolakan LPJ 1. Penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2. Diterima dengan rekomendasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian / Bidang Instansi Terkait
	777	Penyimpangan Pejabat Publik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	779	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait.
59	780	BIDANG KEPEGAWAIAN	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	781	Pengawasan Pengadaan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	782	Pengawasan Kedudukan / Jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	783	Pengawasan Kesejahteraan PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	784	Pengawasan Cuti	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait.
	785	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait.
	786	Pengawasan Tata Usaha / Administrasi PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	787	Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Parpol	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
	788	Persengketaan PNS , Penyimpangan pejabat/PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait.
	789	Pengawasan Pendidikan PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas,serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait
60	790	BIDANG KEUANGAN				
	791	Pengawasan Anggaran / APBD	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	792	Pengawasan Otorisasi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	793	Pengawasan Verifikasi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	794	Pengawasan Pembukuan / Akuntansi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	795	Pengawasan Perbendaharaan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	796	Pengawasan pembinaan Perbendaharaan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	797	Pengawasan Pendapatan/ Penerimaan Pajak	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait
	798	Pengawasan Keuangan Pendidikan PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian Bidang Instansi Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	7	8
	799	Pengawasan Bendaharawan/ Pemegang Kas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas, serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bagian/Bidang Instansi terkait

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI